

**EVALUASI PENGAWASAN PEMBERIAN
KREDIT MODAL KERJA SEBAGAI UPAYA
UNTUK MEMINIMALISIR KREDIT
BERMASALAH**

(STUDI PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
(PERSERO) TBK CABANG PEMBANTU WATES KABUPATEN KEDIRI)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

ARUM NOVIANITA WITANTI

NIM.125030218113004



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2016**

MOTTO

"Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa usaha"



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Modal Kerja
Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah
(Studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
(Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates)

Disusun Oleh : Arum Novianita Witanti

NIM : 125030218113004

Fakultas : Ilmu Administrasi

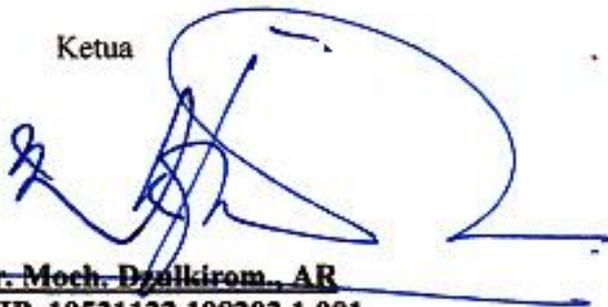
Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi/Minat : Manajemen Keuangan

Malang, Agustus 2016

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Moch. Dzulkrirom, AR
NIP. 19531122 198203 1 001

Anggota



Drs. Topowijono M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 26 September 2016
Jam : 12.30
Skripsi atas nama : Arum Novianita Witanti
Judul : Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Modal Kerja
Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah
(Studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
(Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri)

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

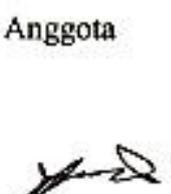

Dr. Moch. Dzulkirom, AR
NIP. 19531122 198203 1 001

Anggota


Drs. Topowijono M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota


Dr. Drs Muhammad Saifi M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota


Drs. R. Rustam Hidayat M.Si
NIP. 19570909 198303 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, Agustus 2016



Arum Novianita Witanti
125030218113004

RINGKASAN

Arum Novianita Witanti, 2016, **Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri)**, Dr. Moch. Dzulkirom AR, Drs. Topowijono M.Si, 99 hal+xvi.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berperan untuk mendukung perekonomian dan kegiatan sehari-harinya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat atau dapat dikenal dengan istilah kredit. Salah satu bank yang memenuhi jasa masyarakat baik pengusaha besar, menengah atau pengusaha kecil yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero)Tbk Cabang Pembantu Wates menawarkan berbagai macam layanan terhadap masyarakat salah satunya yaitu kredit. Pengolahan pemberian kredit harus dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prinsip kehati-hatian. Penggunaan fasilitas kredit dapat berjalan dengan baik apabila hal tersebut didukung dengan pengawasan yang baik dan benar.

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemberian kredit modal kerja sebagai upaya untuk meminimalisir kredit bermasalah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates serta untuk mengetahui pengawasan kredit modal kerja yang seharusnya dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates sebagai upaya untuk meminimalisir kredit bermasalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Langkah-langkah dalam analisis data pada penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan pengawasan pemberian kredit modal kerja yang ditinjau dari prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates dimulai sejak pra realisasi kredit sampai dengan debitor melunasi kredit, Evaluasi kredit bermasalah pada Kredit Modal Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates pada 3 (tiga) periode yaitu 2013, 2014 dan 2015.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan pemberian kredit modal kerja yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates belum maksimal, kunjungan yang dilakukan ke tempat debitor hanya sekali setelah pencairan kredit dan akan dilakukan kembali pada saat nasabah mulai terlihat mengalami masalah.

Pengawasan kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates disarankan untuk lebih ditingkatkan sehingga dapat meminimalisir kredit bermasalah yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan bank, agar nantinya kredit yang disalurkan benar-benar akan kembali sehingga bank tidak mengalami kerugian.

SUMMARY

Arum Novianita Witanti, 2016, *The Evaluation of Working Capital Loan Lending Supervision as an Effort To Minimize Non-Performing Loans (A Case-Study at PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk. Wates, Kediri)*, Dr. Moch. Dzulkrirom AR, Drs. Topowijono M.Si, 105hal+xiv.

Banking is a financial institution whose role is to support the economy and everyday activities to collect funds from the public and to channel back to them or can be known by the term "loan". One of the banks that meets good public services in form of large, medium, as well as small businesses is Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk. Wates which offers a range of services to the public, one of which is loan. The management of loan must be done as well as possible in accordance with the established provisions and with the precautionary principle. The use of the loan facility can be run properly if it is backed up with good and correct supervision.

This study has two objectives namely to investigate the implementation of supervision of working capital loan in an attempt to minimize the problem loans at PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Wates and to investigate the working capital credit supervision that should be done by PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Wates in an effort to minimize bad debts. The type of the research used in this research is descriptive case study approach.

The Steps in data analysis in this study are the evaluation of the supervision of working capital loan whose terms of lending procedures are conducted by PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Wates started since pre realization of the loan until the debtors pay off the loans; the evaluation of non-performing loans in the Working Capital Loan of PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Wates in three (3) periods - 2013, 2014 and 2015.

Based on the results of the research, the supervision of working capital loan made by PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk. Wates is less than the maximum; the visit made to the debtor is only once after the disbursement of credit and will be redone when the customers begin to get the problem.

The loan supervision at PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk. Wates should be further improved so as to minimize the problem loans that can affect the health of the bank, so that later loan lending can go back so that the bank does not lose.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri)**".

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik apabila tidak ada keterlibatan dari berbagai pihak yang telah berkenaan memberikan dukungan dan doa. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono.,M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Wilopo, M.AB, selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Moch. Dzulkirom A.R Selaku Koordinator Program Studi Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya kampus IV, serta

5. selaku Ketua Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs Topowijono M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan pengarahan, bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Kurniawati selaku pimpinan cabang pembantu wates yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Mas Dimas selaku bagian kredit umum dan para staf bank jatim cabang pembantu wates yang telah memberikan data-data dan informasi sehingga dapat membantu dalam proses penelitian.
9. Keluarga tercinta Bapak, Ibu dan kakak yang selalu memberikan semangat, dorongan dan do'a yang begitu tulus sehingga sangat bermanfaat untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabatku tercinta Intan Wulandari, Dian Rahmawati Ahmad Putri, Desi Sistianti Permatasari, Partha Septiana terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
11. Teman-teman seperjuangn angkatan 2012, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebut satu persatu penulis mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuan yang diberikan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya

membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Semoga amal baik dari semua pihak yang memberikan kontribusinya dalam penyusunan skripsi ini akan senantiasa mendapatkan limpahan pahala dan rahmat serta petunjuk dari ALLAH SWT. Amin

Malang, 5 Agustus 2016

Peneliti



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Perbankan	11
1. Pengertian Bank	11
2. Fungsi Bank	12
3. Jenis-jenis Bank	12
4. Sumber-sumber Dana Bank	14
B. Manajemen Perkreditan Bank	16
1. Pengertian Manajemen Kredit.....	16
2. Pengertian Kredit	16
3. Unsur-unsur Kredit	18
4. Tujuan dan Fungsi Kredit	19
5. Manfaat Kredit Bank	20
6. Jenis-jenis Kredit	21
7. Risiko Kredit	23
8. Jaminan Kredit	23
9. Prinsip Penilaian Kredit	25
10. Jenis Pembebanan Suku Bungan Kredit	28
11. Prosedur Pemberian Kredit	29
12. Kebijakan Perkreditan Bank	31
C. Kredit Modal Kerja	33
D. Pengawasan Kredit	34
1. Pengertian Pengawasan	34
2. Pengertian Pengawasan Kredit	35
3. Tujuan Pengawasan Kredit	36

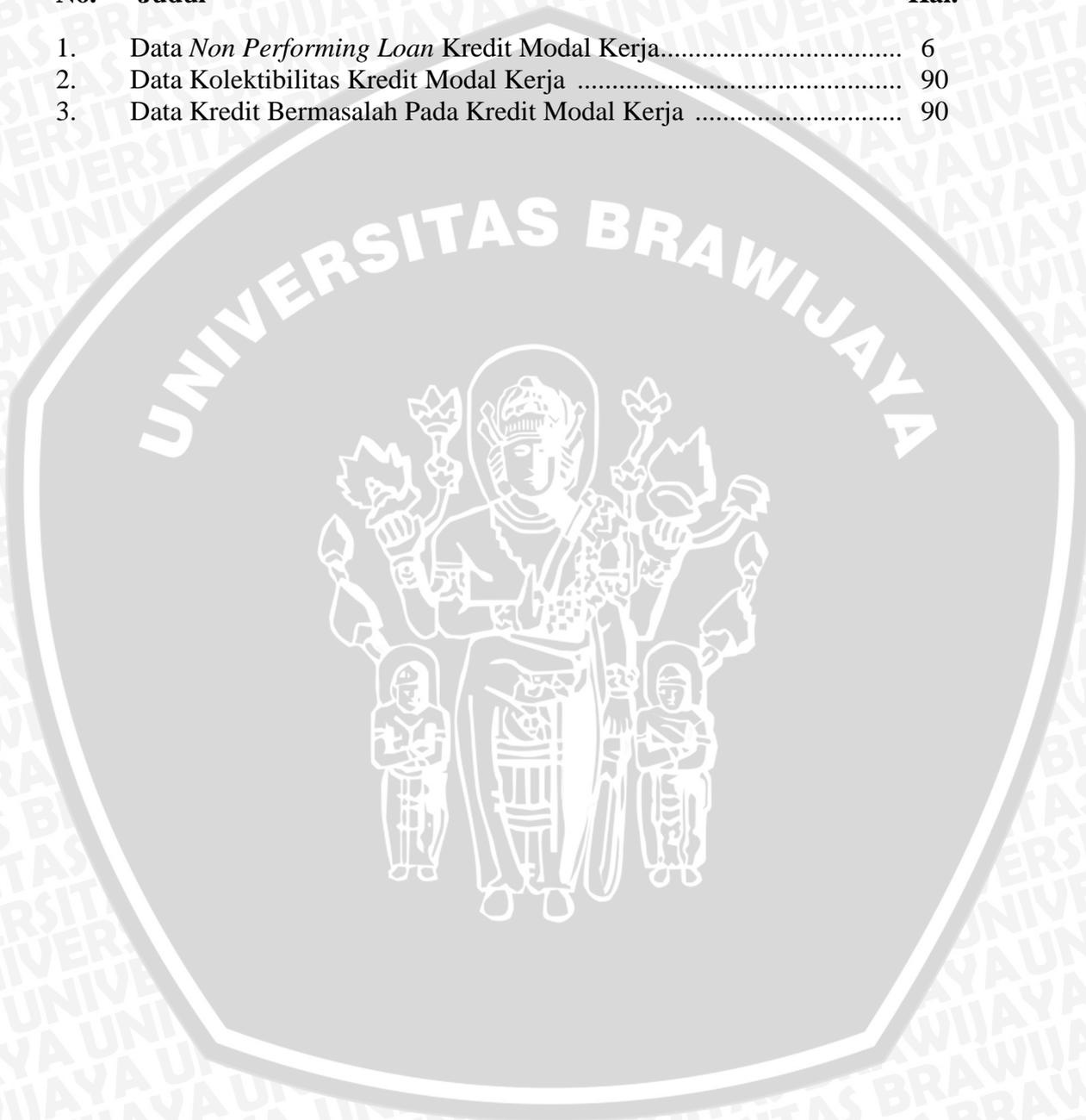


4.	Jenis Pengawasan Kredit	37
5.	Teknik Pengawasan Kredit	37
6.	Aspek Pengawasan Kredit	39
E.	Kredit Bermasalah.....	40
1.	Pengertian Kredit Bermasalah.....	40
2.	Penyebab Kredit Bermasalah.....	41
3.	Teknik Mengatasi Kredit Bermasalah.....	42
 BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	42
B.	Fokus Penelitian	43
C.	Lokasi Penelitian	43
D.	Sumber Data	44
E.	Teknik Pengumpulan Data	45
F.	Instrumen Penelitian	46
G.	Analisis Data	47
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Umum Lokasi Perusahaan.....	50
1.	Sejarah Perusahaan	50
2.	Visi dan Misi Perusahaan.....	54
3.	Motto Perusahaan	55
4.	Slogan Perusahaan	55
5.	Bidang Usaha Perusahaan	56
6.	Lokasi Perusahaan	57
7.	Produk-produk Perusahaan	57
B.	Penyajian Data	67
1.	Struktur Organisasi Perusahaan	67
2.	<i>Job Description</i> Struktur Organisasi	70
3.	Kredit Modal Kerja	74
4.	Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja	75
5.	Contoh Pemberian Kredit Modal Kerja	85
6.	Pengawasan Pemberian Kredit Modal Kerja	86
7.	Kolektibilitas Kredit	89
C.	Analisis dan Interpretasi Data	91
1.	Analisis Pemberian Kredit Modal Kerja	91
2.	Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kredit	98
3.	Analisis <i>Non Performing Loan</i>	99
 BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	104
B.	Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

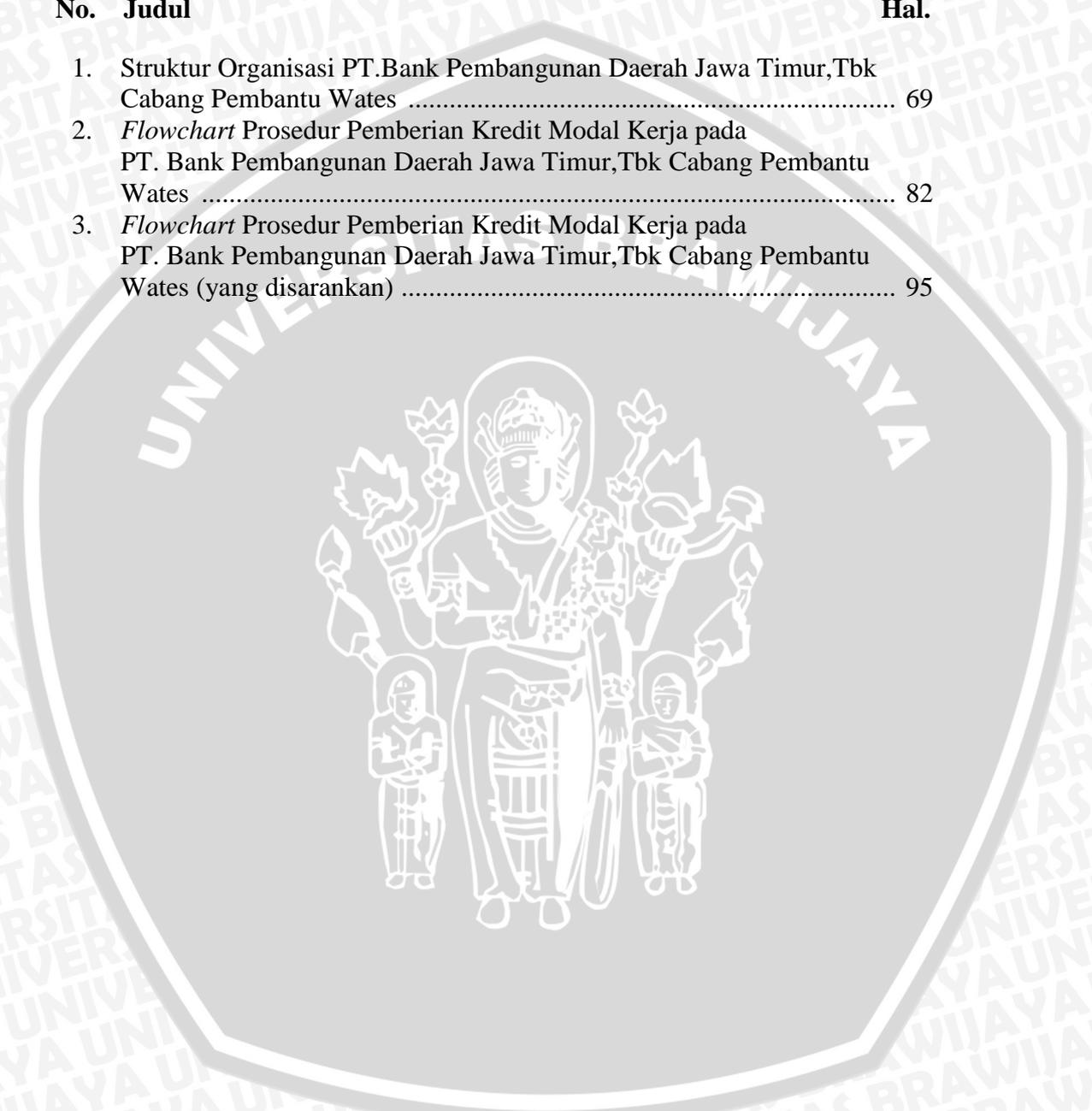
DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Data <i>Non Performing Loan</i> Kredit Modal Kerja.....	6
2.	Data Kolektibilitas Kredit Modal Kerja	90
3.	Data Kredit Bermasalah Pada Kredit Modal Kerja	90



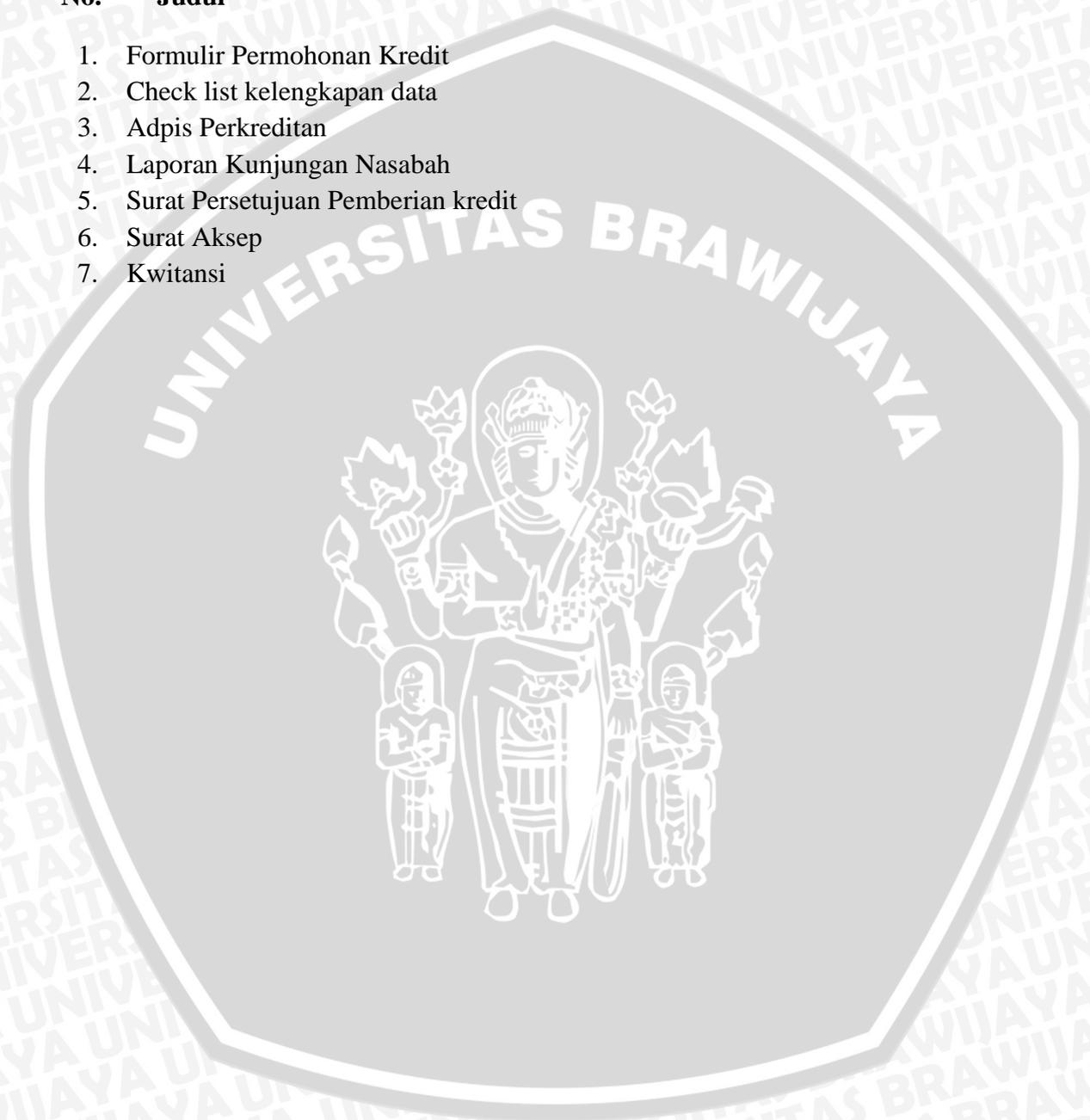
DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	Struktur Organisasi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk Cabang Pembantu Wates	69
2.	<i>Flowchart</i> Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk Cabang Pembantu Wates	82
3.	<i>Flowchart</i> Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk Cabang Pembantu Wates (yang disarankan)	95



DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|------------------------------------|
| 1. | Formulir Permohonan Kredit |
| 2. | Check list kelengkapan data |
| 3. | Adpis Perkreditan |
| 4. | Laporan Kunjungan Nasabah |
| 5. | Surat Persetujuan Pemberian kredit |
| 6. | Surat Aksep |
| 7. | Kwitansi |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan lembaga keuangan dalam mendukung perekonomian suatu negara sangat besar, karena hampir setiap kegiatan perekonomian yang dijalankan selalu membutuhkan keberadaan lembaga keuangan. Lembaga keuangan lebih berperan sebagai agen dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, lembaga keuangan yang paling berperan dalam proses pembangunan dari waktu ke waktu adalah perbankan. Artinya bahwa keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Kegiatan yang dilakukan bank dalam menghimpun dana yaitu berupa tabungan, simpanan giro, deposito dan bentuk lainnya. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman modal (kredit). Penyaluran dana dalam bentuk kredit tersebut dapat diberikan kepada masyarakat atau perusahaan yang telah mengajukan permohonan kredit sesuai dengan sistem dan persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.

Kredit merupakan sistem keuangan untuk semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang

telah disepakati (Hasibuan, 2008:87). Prinsip dalam pemberian atau penyaluran kredit hanya atas kepercayaan dan kehati-hatian, sehingga dengan adanya kredit stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilannya mengelola kredit. Bank yang berhasil mengelola kreditnya akan berkembang, sedangkan bank yang mengalami kredit bermasalah akan dapat mengalami kemunduran.

Salah satu jenis kredit yang disalurkan oleh bank adalah kredit modal kerja. Bank dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit modal kerja senantiasa berdasarkan keyakinan bahwa debitor (peminjam dana atau modal) mampu mengembalikan kredit yang diperolehnya pada jangka waktu yang telah ditetapkan atau sesuai perjanjian antara pihak debitor dan kreditur (bank). Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014:149) "Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah". Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sesuai dengan hakekatnya yang selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Hal ini tentunya akan menyebabkan masyarakat memerlukan bantuan untuk tambahan modal. Modal merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang tercapainya eksistensi kegiatan. Perbankan mempunyai peranan dalam rangka mengatasi problem kebutuhan modal yaitu dengan cara memperoleh dana melalui kredit. Sehingga dengan modal yang di dapat tersebut kebutuhan modal kerja usaha dapat teratasi untuk memperlancar dan meningkatkan produksi operasionalnya serta untuk mempertahankan kelangsungan aktivitas usahanya.

Menurut Firdaus (2011:83) dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama

dalam kredit benar-benar terwujud dan kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya. Pertimbangan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh pihak bank dapat dilakukan dengan cara yaitu penilaian analisis 5C yang meliputi *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi), dan *Collateral* (jaminan). Selain itu Kasmir (2014:139) mengemukakan bahwa penilaian kredit juga memperhatikan aspek-aspek pertimbangan kredit yaitu menilai suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan, dengan penilaian aspek yang meliputi aspek yuridis atau hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis atau operasi, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan aspek Amdal. Namun demikian terkadang bank juga melakukan ketidaktelitian dalam menganalisis kredit, baik itu masalah persyaratan atau kebijaksanaan yang diberikan, sehingga menimbulkan beberapa kendala yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah.

Kredit bermasalah merupakan bagian dari kehidupan bisnis perbankan. Bank harus berani menanggung risiko menghadapi kesulitan menagih kredit yang diberikan kepada debitor tertentu. Selain itu untuk menghindari atau meminimalkan kendala tersebut perlu adanya pengawasan kredit. Menurut Abdullah (2005:95) "Pengawasan kredit adalah suatu proses penilaian dan pemantauan kredit sebagai upaya untuk menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit". Pentingnya pengawasan kredit yaitu sebagai sarana untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atas aktivitas sebelum dilaksanakan suatu kegiatan yang mungkin terjadi atau meminimalkan NPL.

Pengawasan kredit dilakukan secara berkesinambungan sejak permohonan kredit sampai dengan pelunasan atau penyelesaian kredit.

Salah satu bank yang memenuhi jasa masyarakat, baik pengusaha besar, menengah atau pengusaha kecil yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dituntut untuk terus berinovasi dan terus meningkatkan kepuasan nasabah dengan memberikan layanan perbankan terhadap masyarakat Jawa Timur akan kebutuhan jasa perbankan. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (persero), Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri menawarkan berbagai macam layanan terhadap masyarakat dari produk tabungan hingga menawarkan produk kredit atau pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan atau usaha yang dijalankan. Berbagai macam produk yang ditawarkan perbankan salah satu yang banyak diminati masyarakat yaitu kredit, dan kredit yang banyak diajukan atau digunakan masyarakat untuk memperoleh dana yaitu kredit modal kerja.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk tentu memiliki kriteria dan prosedur dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah dan harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin meminjam dana bank sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh bank. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk memiliki proses pengajuan dan pencairan kredit yang dilakukan secara cepat, hal tersebut yang akan menimbulkan kegiatan analisis kredit berlangsung kurang optimal.

Prosedur pemberian kredit yang tepat dapat menjamin ketepatan sasaran kredit, ketepatan penggunaan kredit dan ketepatan dalam waktu pengembalian kredit.

Sasaran kredit sangat menentukan dimana kredit yang diberikan benar-benar harus dapat mendukung perkembangan usaha debitur dan kredit yang telah diberikan oleh bank akan menjadi pendapatan dan keuntungan bank. Kebenaran nasabah dalam penggunaan kredit yang diberikan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah diajukan ketika melakukan permohonan kredit. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi kredit bermasalah, dimana debitur mengingkari janjinya dalam penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan.

Berikut adalah data tentang kredit modal kerja yang disalurkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (persero) Tbk. Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri, serta data kredit yang bermasalah periode 31 Desember 2013 s/d 31 Desember 2015, disajikan pada tabel 1 berikut ini (Halaman 6)

Tabel 1 Data *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Modal Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Periode 31 Desember 2013 s/d 31 Desember 2015 (dalam rupiah)

Tahun	Kredit Modal Kerja		NPL
	Disalurkan	Kredit Bermasalah	
2013	54.881.928.592,91	486.145.273,12	0.89 %
2014	74.773.907.563,56	257.009.638,38	0.34 %

2015	80.894.344.138,78	808.686.917,16	0.99 %
------	-------------------	----------------	--------

Sumber : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (persero) Tbk. Capem Wates Kab Kediri

Pada Tabel 1 merupakan data *Non Performing Loan* yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri, dapat dilihat dari perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Besarnya *Non Performing Loan* (NPL) selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi, NPL paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,99 % dan NPL yang paling rendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 0,34%. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk memiliki ketentuan target *Non Performing Loan* (NPL) untuk masing-masing cabang yang didirikannya diberbagai wilayah Jawa Timur. Ketentuan yang telah dibuat oleh kantor pusat, dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates telah ditetapkan target *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 0,65%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil perkembangan kredit per tahunnya, disimpulkan bahwa Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates pada tahun 2013 dan 2015 melebihi target yang telah ditentukan, sedangkan pada tahun 2014 dibawah target yang ditentukan. Penelitian ini bermaksud untuk menelusuri lebih lanjut mengenai kebijakan serta pengawasan terhadap pemberian kredit modal kerja yang diperuntukkan bagi calon debitur. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ditulis dengan judul "**Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Pada PT Bank Pembangunan**

repository.ub.ac.id

Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemberian kredit modal kerja yang dilaksanakan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri sebagai upaya untuk meminimalisir kredit bermasalah ?
2. Bagaimana pengawasan kredit modal kerja yang seharusnya dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri sebagai upaya untuk meminimalisir Kredit bermasalah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemberian kredit modal kerja sebagai upaya untuk meminimalisir kredit bermasalah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri.

2. Mengetahui pengawasan kredit modal kerja yang seharusnya dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri sebagai upaya untuk meminimalisir kredit bermasalah.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai alat untuk menilai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates dalam menerapkan pemberian kredit modal kerja yang dijalkannya.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi bank untuk merumuskan kebijakan yang terbaik. Serta untuk meningkatkan pengawasan pemberian kredit.
2. Kontribusi Akademis
 - a. Merupakan kesempatan bagi peneliti dalam memperluas wawasan pengalaman dan memperdalam pengetahuan peneliti serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah. Tentang perbankan khususnya yang berhubungan langsung dengan penerapan teori-teori perkreditan.
 - b. Sebagai bahan yang dapat digunakan untuk sumber informasi dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap suatu hasil karya ilmiah, maka peneliti memberikan gambaran yang secara singkat mengenai sistematika pembahasan dari masing-masing bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini di dalamnya menjelaskan mengenai latar belakang penulisan atas judul yang telah ditetapkan menjadi topik, kemudian terdapat perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta yang terakhir terdapat sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini dikemukakan mengenai kerangka teori yang berkaitan dengan pembahasan yang diambil dari beberapa literatur, yang digunakan sebagai dasar untuk pemecahan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menjelaskan bagaimana jenis penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian yang digunakan serta analisa data yang diharapkan dapat membantu proses penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan ini secara garis besar menyajikan analisis dan interpretasi data mengenai permasalahan yang ada berkenaan dengan pengawasan pemberian kredit modal kerja seperti bagaimana perusahaan

melakukan pengawasan pemberian kredit modal kerja guna mencegah terjadinya kredit bermasalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya disertai dengan saran peneliti atas kesimpulan yang yang diperoleh dari penelitian agar lebih baik kedepannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank memiliki peranan yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau kegiatan usaha perusahaan maka sangat membutuhkan lembaga keuangan untuk menyediakan dana guna membiayai kegiatan usahanya. Untuk itu peran bank sangat penting untuk memajukan perekonomian suatu negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dana/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Sedangkan menurut Kasmir (2014:3) mengemukakan bahwa bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya."

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan

- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit)
- c. Memberikan jasa-jasa perbankan lainnya

2. Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai perantara dibidang keuangan. Secara lebih spesifiknya bank dapat berfungsi sebagai lembaga yang landasannya adalah kepercayaan serta lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi (Budisantoso dan Nuritomo,2014:3).

Menurut Sunarti (2011:81) "Bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediate antara unit surplus dana dan unit defisit".

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi utama bank yaitu sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta sebagai sarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi.

3. Jenis-jenis Bank

Menurut kasmir (2006:18) jenis perbankan dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

- a. Dilihat dari segi fungsinya
Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 sebagai berikut :
 - 1) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran..
 - 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
- b. Dilihat dari segi kepemilikannya

- 1) Bank milik Pemerintah, dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.
 - 2) Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.
 - 3) Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara
 - 4) Bank milik campuran, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.
- c. Dilihat dari Segi Status
- 1) Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*.
 - 2) Bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.
- d. Dilihat dari segi cara menentukan harga
- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (barat), mayoritas Bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.
 - 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam), bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah ini aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat bermacam-macam jenis bank dan perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari beberapa segi. fungsi bank, kepemilikan bank, status yaitu siapakah nasabah yang mereka layani, dan jenis perbankan juga diklasifikasikan berdasarkan caranya menentukan harga jual dan harga beli.

4. Sumber-Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya (Kasmir, 2006:61). Dana yang dihimpun dapat berasal dari dana perusahaan maupun lembaga lain diluar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Sumber dana yang dipilih harus dilakukan secara tepat karena menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Menurut UU No.10 tahun 1998, terdapat beberapa sumber-sumber dana bank antara lain:

a. Dana Pihak Kesatu

Dana pihak kesatu merupakan dana yang bersumber dari bank sendiri yang diperoleh dari modal sendiri (modal setoran dari para pemegang saham). Apabila saham yang ada dalam portepel belum habis terjual, tetapi kebutuhan dana masih perlu, maka pencairan dapat dilakukan dengan cara menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi apabila tujuan perusahaan tersebut untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan tersebut dapat mengeluarkan saham baru dan menjual ke pasar modal. Terdapat keuntungan dan kerugian dari sumber dana sendiri, keuntunganya yaitu tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar, sedangkan kerugian dari sumber dana sendiri yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama untuk memperoleh dana dalam jumlah yang besar.

b. Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat dan merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan sebagai ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana ini relatif lebih mudah jika



dibandingkan dengan sumber lainnya dan paling dominan, asalkan bank dapat memberikan bunga dan fasilitas yang menarik. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana ini merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas bank harus dapat menawarkan produknya atau berbagai jenis simpanan.

c. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga diperoleh dari lembaga lainnya antara lain dari kredit likuiditas dari bank, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank luar negeri dan dari surat berharga pasar uang (SBPU). Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan digunakan apabila bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana dari bank sendiri maupun masyarakat luas. sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu. Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai transaksi-transaksi tertentu.

B. Manajemen Perkreditan Bank

1. Pengertian manajemen perkreditan

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari masalah keuangan. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Pemberian atau Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun dari simpanan

banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dengan prinsip kehati-hatian.

Menurut Firdaus & Ariyanti (2011:4) bahwa manajemen perkreditan adalah pengelolaan kredit yang dijalankan oleh bank yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sedemikian rupa sehingga kredit tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan debitur.

Manajemen kredit bank sangat penting untuk dipelajari dan diimplementasikan hal tersebut disebabkan karena berbagai alasan. Salah satunya alasan yaitu bahwa kredit yang disalurkan oleh bank (konvensional) merupakan bagian terbesar dari asset yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan.

2. Pengertian kredit

Istilah kredit berasal dari kata italia, *credere* yang artinya kepercayaan. Maksud dari percaya yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet.

Pengertian kredit menurut UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yaitu kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kasmir (2007:72) berpendapat bahwa "kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu". Pemberian kredit atau peyaluran kredit harus dilakukan dengan keyakinan berdasarkan pada analisis yang mendalam atas iktikad dan

kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaannya sesuai dengan perjanjian. Mengingat hal tersebut di atas dan adanya prinsip kehati-hatian dalam mengelola bank serta adanya risiko yang selalu melekat dalam penyaluran dana, maka sebelum kredit atau pembiayaan disalurkan bank selalu ingin mengetahui segala sesuatu tentang kemampuan dan kemauan nasabah (debitor) untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank.

Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan suatu hutang atau pinjaman dengan adanya kesepakatan atau perjanjian antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima (debitor) dan harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

3. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian suatu fasilitas kredit atau pemberian kredit menurut Ismail (2010:188) sebagai berikut:

- d. **Debitor dan Kreditur**
Yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi kredit. Debitor (nasabah) adalah pihak yang mendapatkan pinjaman dari kreditur, sedangkan kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau menyalurkan pinjaman yaitu bank.
- e. **Perjanjian**
Setiap kredit yang disalurkan oleh bank harus didasari adanya perjanjian antara bank dan debitor berupa perjanjian kredit. Perjanjian ini akan mengikat kedua belah pihak yaitu bank dan debitor untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai yang tertuang dalam perjanjian kredit.
- f. **Jangka waktu**
Setiap kredit harus ditentukan jangka waktu pemberian kredit, yaitu jangka waktu mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kredit lunas.
- g. **Balas jasa**
Bank memberikan kredit dengan tujuan agar memperoleh pendapatan atau balas jasa, yaitu berupa bunga.
- h. **Kepercayaan**

Bank memberikan kredit kepada debitur karena bank percaya bahwa dana yang disalurkan kepada debitur akan dapat dikembalikan.

i. Risiko

Setiap penyaluran dana pasti mengandung risiko bahwa dana itu tidak berhasil. Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur akan mengandung risiko adanya kemungkinan debitur tidak dapat mengembalikan dana pinjamannya. Oleh karena itu bank harus melakukan analisis kredit kepada debitur.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian suatu fasilitas kredit tentu saja terdapat unsur-unsur kredit yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Unsur kredit harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak kreditor, unsur kredit terdiri dari debitur dan kreditor, perjanjian, jangka waktu, balas jasa, kepercayaan dan risiko. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak ada atau dihilangkan maka penyaluran kredit tidak akan dapat terlaksana.

4. Tujuan dan Fungsi kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang akan dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Menurut Hasibuan (2008:88) tujuan penyaluran kredit antara lain adalah untuk:

- a. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
- b. Melaksanakan kegiatan operasional bank
- c. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada
- d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
- e. Memperlancar lalu lintas pembayaran
- f. Menambah modal kerja perusahaan
- g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit tentunya juga memiliki suatu fungsi. Fungsi kredit secara umum pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang

semuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak (firdaus,2011:5)

Menurut Hasibuan (2008:106) terdapat beberapa fungsi kredit bagi masyarakat antara lain:

- a. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. Meningkatkan daya guna uang
- d. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- e. Meningkatkan pemerataan pendapatan
- f. Meningkatkan hubungan internasional
- g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai tujuan dan fungsi kredit, dapat disimpulkan bahwa semua bank dalam memberikan suatu fasilitas kredit tentu memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Salah satu tujuan bank dalam pemberian kredit yaitu memperoleh pendapatan dari bunga kredit.

5. Manfaat kredit bank

Manfaat kredit bank cukup banyak apabila dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Menurut Firdaus (2011:6) sebagai berikut

- a. Manfaat kredit bagi debitor
 - 1) Untuk meningkatkan usahanya maka debitor dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja, peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
 - 2) Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitor layak untuk dibiayai
 - 3) Jumlah bank yang ada di negara-negara dewasa ini relatif banyak. Sehingga calon debitor lebih mudah untuk memilih bank yang cocok dengan usahanya.
 - 4) Jangka waktu kredit bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh calon debitor.
- b. Manfaat kredit bagi kreditur
 - 1) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitor.
 - 2) Dengan pemberian kreditnya bank sekaligus dapat memasarkan atau menawarkan produk-produk/jasa-jasa lainnya.

- 3) Bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi.
- c. Manfaat kredit bagi pemerintah/negara
 - 1) Sebagai fasilitas untuk mendorong aktivitas pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja.
 - 2) Kredit bank dapat dijadikan alat/piranti pengendalian moneter.
 - 3) Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
 - 4) Secara tidak langsung pemberian kredit bank juga akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.

Beberapa manfaat kredit yang diuraikan di atas dapat dilihat dari berbagai pihak yaitu bagi debitor, kreditur, pemerintah/ negara dan masyarakat luas. Jadi dengan adanya kredit dapat menguntungkan berbagai pihak seperti halnya bagi debitor yang kesulitan untuk memperoleh modal dalam upaya untuk meningkatkan usahanya, debitor dapat meminjam dana berupa kredit. Sedangkan bagi kreditur dapat memperoleh pendapatan dari kredit tersebut yaitu berupa bunga.

6. Jenis-jenis kredit

Berbagai jenis kegiatan usaha menyebabkan beragam kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam juga menyebabkan jenis kredit menjadi beragam yang masing-masing dapat dilihat dari berbagai segi. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan atau dibutuhkan oleh debitor (nasabah). Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari berbagai jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat.

Secara umum beragam jenis-jenis kredit yang ditawarkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi menurut Kasmir (2007:76), antara lain:

- a. Dilihat dari Segi Kegunaan
 - 1) Kredit Investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk memperoleh perluasan usaha atau membangun proyek/pribadi baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
 - 2) Kredit Modal Kerja (KMK), merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai/karyawan. Kredit modal kerja ini merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.
- b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
 - 1) Kredit Produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 - 2) Kredit Konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
 - 3) Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan yang biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya atau angsurannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
- c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu
 - 1) Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - 2) Kredit Jangka Menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit ini dapat diberikan untuk modal kerja.
 - 3) Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini sering digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan kare.
- 4) Dilihat dari Segi Jaminan
 - 1) Kredit dengan Jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
 - 2) Kredit tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama berhubungan baik dengan bank yang bersangkutan.
- 5) Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- 1) Kredit Pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Kredit Peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek, misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
- 2) Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
- 3) Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa yang sedang belajar.
- 4) Kredit Profesi, kredit ini diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, doktor atau pengacara.
- 5) Kredit perumahan, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

Ber macam-macam jenis kredit yang telah diuraikan di atas disebabkan jenis kegiatan usaha yang beragam sehingga kebutuhan akan danapun juga beragam. Calon debitur dapat menyesuaikan kredit apa yang akan diajukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga beragam yang dapat dilihat dari berbagai segi.

7. Risiko Kredit

Risiko kredit terjadi pada saat pihak kreditur dan debitur melakukan tindakan yang tidak hati-hati dalam melakukan keputusan kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku (Irham, 2014:86).

Menurut Budisantoso & Nuritomo (2014:135) penjelasan mengenai risiko kredit yaitu risiko yang dihadapi oleh bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Karena berbagai

sebab, debitor mungkin saja menjadi tidak memenuhi kewajibannya kepada bank seperti pembayaran pokok pinjaman. Pembayaran bunga, dan lain-lain. Sehingga dengan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank menyebabkan bank menderita kerugian berupa tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit yang sehat berimplikasi pada kelancaran pengembalian kredit oleh nasabah atas pokok pinjaman dan atau beban bunga. Ketidاكلancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga secara langsung dapat menurunkan kinerja bank hal ini yang dimaksud dengan risiko kredit, dimana merupakan risiko yang harus ditanggung oleh bank.

8. Jaminan Kredit

Setiap menjalankan suatu kegiatan usaha apa pun tentu mengandung suatu tingkat kerugian. Adanya risiko kerugian di mana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar semua kewajibannya baik untuk sementara waktu atau selamanya harus segera diantisipasi oleh dunia perbankan. Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan adanya jaminan kredit di mana jaminan, biasanya melebihi nilai kredit maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet.

Pada praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitor menurut Kasmir (2007:80) adalah:

- a. Jaminan dengan barang-barang seperti:
 - 1) Tanah

- 2) Bangunan
 - 3) Kendaraan bermotor
 - 4) Mesin-mesin/peralatan
 - 5) Barang dagangan
 - 6) Tanaman/kebun/sawah
- b. Jaminan surat berharga seperti:
- 1) Sertifikat Saham
 - 2) Sertifikasi Obligasi
 - 3) Sertifikat tanah
 - 4) Sertifikat Deposito
 - 5) Wesel
- c. Jaminan orang atau perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung kerugian tersebut.

- d. Jaminan asuransi

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik obyek kredit, seperti kendaraan, dan gedung. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit merupakan faktor yang penting yang harus diperhatikan oleh bank. karena kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

9. Prinsip Penilaian Kredit

Sebelum suatu pemberian atau penyaluran kredit dilaksanakan maka pihak kreditur/ yang meminjamkan harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan tersebut benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut dapat diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut diberikan. Penilaian kredit oleh

bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan dari debitor/nasabahnya.

Penilaian umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dapat dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C menurut Kasmir (2014:136) adalah sebagai berikut:

a. *Character* (Watak/kepribadian)

Karakter merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitor dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup yang dianutnya. Dari sifat dan watak dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar pinjaman.

b. *Capacity* (kapasitas/kemampuan)

Kapasitas mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama mengelola usahanya.

c. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi). Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang

ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, beberapa modal sendiri dan modal pinjaman.

d. *Condition* (Kondisi)

Untuk penilaian suatu kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan diprediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai harus benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e. *Colleteral* (Jaminan)

Jaminan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penelitian sebagai berikut:

a. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu.

b. *Party* (Golongan)

Mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakter.

c. *Perpose* (Tujuan)

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect*

Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka semakin baik.

Sehingga jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode-periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitor dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. (Kasmir 2006)

Pembahasan tentang prinsip penilaian kredit sangat diperlukan untuk mengetahui apakah usaha pemohon kredit itu layak atau tidak untuk diberi bantuan kredit. Dalam artian lain apakah permohonan kredit tersebut *fleksible* yaitu apabila kredit diberikan, maka usahanya akan berkembang baik dan mampu untuk mengembalikan pinjaman kreditnya, baik pokok maupun bunga dalam jangka waktu yang wajar atau sebaliknya.

10. Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit

Setiap nasabah yang memperoleh fasilitas kredit dari bank tentunya akan dikenakan kewajiban membayar kembali (suku bunga kredit). Pembayaran kewajiban dapat dilakukan setiap periode apakah harian, mingguan atau bulanan, pembayaran ini lebih dikenal dengan nama angsuran. Pembebanan suku bunga oleh bank pastinya memperhatikan jenis kredit yang diberikan atau dibiayai, dan juga yang menjadi pertimbangan menentukan suku bunga adalah tingkat risiko dari masing-masing jenis kredit yang diberikan.

Menurut Kasmir (2007:82) dewasa ini terdapat tiga jenis model pembebanan suku bunga yang sering dilakukan oleh bank yaitu:

- a. *Flate Rate*, merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode, sehingga jumlah angsuran (cicilan) setiap periode pun tetap sampai pinjaman tersebut lunas.
- b. *Sliding Rate*, perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan persentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga dengan dikalikan sisa pinjaman jumlah suku bunga debitur semakin menurun, dan angsuran yang dibayarpun menurun jumlahnya.
- c. *Floating Rate*, merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Dalam perhitungan model ini suku bunga dapat naik turun atau tetap setiap periodenya. Begitu pula dengan angsuran yang dibayar sangat tergantung dari suku bunga pada bulan yang bersangkutan.

Pembebanan suku bunga kredit merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh peminjam dana sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dan nasabah. Pembebanan juga didasarkan pada jenis kredit yang diberikan. Karena suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas, maka hal tersebut harus diperhatikan sebelum kredit disalurkan.

11. Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum debitur memperoleh fasilitas kredit tentunya terlebih dahulu harus melalui beberapa tahapan atau prosedur yang diberikan oleh pihak kreditur/ pihak bank seperti pengajuan proposal kredit dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Prosedur dalam pemberian dan penilaian oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada pemberian persyaratan dan penilaian yang ditetapkan oleh masing-masing bank sesuai dengan pertimbangan.

Secara umum dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum menurut Kasmir (2014:143) adalah:

a. Pengajuan Berkas-berkas.

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit dalam bentuk proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan sebagai syarat permohonan kredit.

1) Pengajuan proposal hendaknya berisi:

a) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama perusahaan berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.

b) Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan permintaan kredit apakah untuk memperbesar omset penjualan, meningkatkan kapasitas produksi.

c) Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) 3 tahun terakhir.

d) Cara pemohon mengembalikan kredit, maksudnya adalah dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

e) Jaminan kredit. Merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

2) Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi *fotocopy*:

a) Akta notaris. Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT. (Perseroan Terbatas) atau yayasan.

b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap pemberian kredit yang terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWPnya.

d) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir

e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan

f) *Fotocopy* sertifikat jaminan

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Penyelidikan berkas pinjaman tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas, jika menurut pihak perbankan belum lengkap, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya, dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup

melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

c. Wawancara awal

Wawancara awal merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

d. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasil *on the spot* akan dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan memberitahu pihak nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. Wawancara II

Wawancara II merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot*, apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

f. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:

1. Jumlah uang yang diterima
2. Jangka waktu kredit
3. Biaya-biaya yang harus dibayar
4. Waktu pencairan kredit

Bagi kredit yang ditolak, maka dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

g. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Penandatanganan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit tersebut dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau surat pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilakukan antara bank dengan debitor secara langsung atau dengan melalui notaris.

h. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

Prosedur pemberian kredit merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum kredit disalurkan. Hal ini harus diperhatikan oleh pihak bank/ pihak kreditur untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Jadi sebelum kredit disalurkan, nasabah harus terlebih dahulu memenuhi prosedur yang telah ditetapkan, sehingga akan mempermudah proses pencairan dana kredit.

12. Kebijakan Perkreditan Bank

Kebijakan perkreditan bank merupakan pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batasan umum dan tempat akan dilakukan, sehingga hal ini harus diprogram dengan baik dan benar, dan program ini didasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian.

Menurut Hasibuan (2008:92) terdapat beberapa kebijakan perkreditan antara lain:

- a. *Bankable*, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria :
 - 1) *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
 - 2) *Effectiveness*, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.
- b. Kebijakan investasi, merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk investasi primer dan sekunder
 - 1) Investasi primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti pembelian motor dan mesin.
 - 2) Investasi sekunder, investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit pada masyarakat. Investasi ini sifatnya produk (menghasilkan). Jangka waktu penyaluran kredit harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas bank tetap terjamin.

- c. Kebijakan risiko, maksudnya dalam penyaluran kredit harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan risiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.
- d. Kebijakan penyebaran kredit, maksudnya kredit harus disalurkan kepada beranekaragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.
- e. Kebijakan tingkat bunga, dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.

Kebijakan perkreditan bank, dapat dilihat dari uraian di atas merupakan pedoman yang menyeluruh, yang memberikan suatu batasan umum dan harus diprogram dengan baik dan benar. Jadi sebelum kredit disalurkan harus memperhatikan beberapa kebijakan perkreditan seperti *Bankable*, kebijakan investasi, kebijakan risiko, kebijakan penyebaran kredit dan kebijakan tingkat bunga.

C. Kredit Modal Kerja

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Setiap menjalankan dan mengembangkan usaha, tentu saja perusahaan sangat membutuhkan yang namanya dana/modal. Dimana nantinya dana/modal tersebut digunakan untuk membiayai usaha yang sedang dijalankan atau yang akan dijalankan, misalnya digunakan untuk pengadaan bahan baku, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Yang sering menjadi penghambat kelancaran usaha yaitu masalah permodalan/dana yang mengalami kesulitan atau kekurangan. Sehingga pihak perusahaan sangat membutuhkan adanya tambahan modal untuk usahanya, yang salah satunya

dapat dilakukan dengan memperoleh pinjaman dari bank berupa kredit modal kerja.

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan (Kasmir, 2007:77). Menurut Ismail (2010:191) bahwa kredit modal kerja diberikan oleh bank dalam rangka memberikan kebutuhan modal kerja perusahaan. Modal kerja perusahaan dapat berupa kebutuhan operasional perusahaan seperti kebutuhan dana untuk menutup piutang-piutang perusahaan.

Kredit modal kerja memiliki jangka waktu pengembalian maksimal satu tahun (bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan) yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai stok barang, piutang dagang, pembelian bahan baku, ataupun kebutuhan modal kerja perusahaan lainnya. Untuk kredit modal kerja, bank menyediakan fasilitas kredit modal kerja bagi usaha skala kecil yaitu dengan plafond kredit sampai dengan Rp 500.000.000, dan usaha skala menengah plafond kredit diatas Rp 500.000.000 sampai 5.000.000.000 (Bastian dan Suhardjono, 2006:251).

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kredit modal kerja merupakan kredit produktif dalam jangka waktu pendek yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan tujuan digunakan untuk keperluan menambah produksi dalam operasionalnya. Jadi kredit modal kerja ini sangat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan modal/dana dalam mengembangkan usahanya.

D. Pengawasan Kredit

1. Pengertian Pengawasan

Bisnis perbankan yang memegang amanah terhadap uang yang dititipkan nasabah perlu menjalankan kegiatan dengan penuh kehati-hatian. Artinya bisnis perbankan harus menjaga agar jangan sampai uang yang dititipkan nasabah disalahgunakan atau diselewangkan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan pengawasan, karena mengingat bisnis perbankan merupakan bisnis berdasarkan kepercayaan yang diberikan nasabah. Ada beberapa penjelasan mengenai pengawasan menurut beberapa ahli :

Kasmir (2014:263) berpendapat bahwa pengawasan adalah aktifitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, baik penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan, dan laporan terhadap hasil kegiatannya. Sedangkan menurut Abdullah (2013:130) menjelaskan bahwa kelancaran operasi bank adalah kepentingan paling utama, melalui pengawasan para manajer dapat menentukan tercapai tidaknya harapan mereka, selain itu pengawasan juga dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli yang berpendapat di atas yaitu penjelasan mengenai pengawasan sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh bagian, unit organisasi maupun secara menyeluruh harus diawasi dan dikendalikan karena pengawasan dilakukan sebagai sarana pencegahan terjadinya penyimpangan atas aktivitas yang telah direncanakan. Selain itu pengawasan dilakukan agar pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan akan mudah untuk dicapai.

2. Pengertian Pengawasan kredit

Salah satu fungsi manajemen dalam usaha untuk mengamankan perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan dengan cara bank melakukan pengawasan kredit baik secara keseluruhan maupun secara individual per nasabah, untuk

mengetahui pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak.

Menurut Rivai (2013:465) Pengawasan kredit yaitu usaha untuk mengendalikan pelaksanaan kredit oleh bank dan nasabah agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan kredit. Menurut Muljono (2001:460) pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kredit selalu terdapat risiko bahwa kredit tersebut berpotensi untuk menjadi kredit macet. Dengan begitu pihak bank harus melakukan pengawasan kredit. Pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam upaya untuk menjaga dan mengamankan kredit sebagai kekayaan bank agar tetap lancar, produktif dan tidak bermasalah.

3. Tujuan Pengawasan Kredit

Kredit merupakan faktor yang utama dalam aset bank dan merupakan sumber utama pendapatan bank. Dengan begitu seharusnya setiap tahap dalam pemberian kredit harus mendapat perhatian supaya tujuan dan sasaran



kredit dapat tercapai. Hal tersebut dapat tercapai apabila dapat diupayakan terciptanya kredit yang sehat. Sebelumnya telah diuraikan pengertian pengawasan kredit secara jelas tujuannya adalah sebagai penjaga dan pengaman dalam pengelolaan tahap-tahap pemberian kredit.

Muljono (2001:460) menjelaskan secara rinci tujuan dari pengawasan perkreditan yaitu sebagai berikut:

- a. Agar penjagaan atau pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank, di bidang perkreditan dapat dilakukan dengan lebih baik untuk menghindarkan penyelewangan-penyelewangan baik dari oknum ekstern bank atau intern bank.
- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.
- c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan dan tata laksana usaha dibidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.
- d. Untuk memajukan agar kebijaksanaan yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas manual perkreditan surat-surat edaran dan dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.

Masing-masing tujuan yang diuraikan di atas mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Administrasi perkreditan yang dijalankan secara benar dan teliti membantu mempermudah dalam menemukan penyelewangan-penyelewangan yang terjadi. Begitu pula dengan adanya sistem dokumentasi yang baik terhadap arsip-arsip perkreditan yang memajukan efisien pengelolaan dibidang perkreditan.

4. Jenis Pengawasan Kredit

Menurut Irham (2014:23) terdapat dua jenis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam bidang pengawasan kredit yaitu:

a. Preventif Control

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak perbankan sebelum kredit tersebut dicairkan atau diberikan kepada calon debitur. Dengan tujuan untuk menghindari kesalahan yang lebih fatal di kemudian hari. Jadi di

sini akan dilihat mulai dari kelengkapan berkas yang diajukan hingga survei ke lapangan seperti jaminan dan bentuk usaha yang akan dilakukan.

b. *Represif Control*

Pengawasan yang dilakukan pada saat kredit tersebut telah diberikan kepada debitur. Pengawasan disini diberikan dengan tujuan agar kreditur tersebut terbangun kedisiplinan yang kuat untuk melunasi setiap pinjamannya secara tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan.

Uraian yang telah disebutkan di atas menjelaskan bahwa pengawasan kredit sangat diperlukan dalam proses pemberian kredit. Pengawasan kredit merupakan upaya pengendalian untuk mencegah risiko dalam pemberian kredit. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat kredit diberikan tetapi juga sampai kredit tersebut dilunasi oleh debitur.

5. Teknik Pengawasan Kredit

Teknik pengawasan kredit adalah pendekatan yang dipakai manajemen disuatu bank dalam melaksanakan kegiatan pengawasan (Muljono, 2001:472). Pelaksanaan teknik pengawasan kredit harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur, dimana yang sebelumnya bank harus mengetahui terlebih dahulu sebab-sebab terjadinya kegagalan dalam perkreditan. Kegagalan mungkin saja disebabkan oleh berbagai masalah yang secara bersamaan. Setelah mengetahui sebab kegagalan tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu memilih teknik-teknik pengawasan kredit. Teknik pengawasan kredit menurut Muljono (2001:476) antara lain :

a. *Control By Exception*

Merupakan suatu teknik pengawasan yang dititik beratkan pada hal-hal yang masih lemah (faktor intern) dan hal-hal yang dapat membahayakan (faktor eksternal), yang merupakan sasaran "perencanaan" untuk mengubah dari sifat yang potensial menjadi *real*.

b. *Verband Control*

Merupakan kegiatan pemeriksaan atas suatu perkiraan-perkiraan yang saling berhubungan dengan itu dan sebaliknya, jika diantara dua perkiraan saling berhubungan itu terdapat kecocokan, maka hal ini menunjukkan adanya suatu yang harus diselidiki lebih lanjut. Teknik ini merupakan salah satu cara untuk mengecek kebenaran informasi yang mencurigakan dan teknik ini dilakukan secara tidak langsung atau tersamar dengan tujuan untuk membantu memecahkan masalah yang timbul.

c. Pengawasan Fisik atau *inspeksi On The Spot*

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung di tempat perusahaan/kegiatan usaha nasabah. Tujuan dari pengawasan ini yaitu:

- 1) Untuk mengecek kebenaran dari seluruh keterangan/data maupun laporan oleh nasabah dibandingkan dengan jumlah dan keadaan secara fisik.
- 2) Secara langsung melihat/meneliti keadaan usaha nasabah dan mengadakan wawancara/ diskusi dengan nasabah tentang seluruh aktivitas perusahaannya.
- 3) Mendidik nasabah untuk selalu menyampaikan laporan kepada bank sesuai dengan kenyataan yang sebenar-benarnya.

Pengawasan fisik dapat dibedakan menjadi 2 jenis antara lain:

- 1) Pengawasan fisik rutin, yang harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan untuk setiap nasabah tanpa kecuali.
- 2) Pengawasan fisik insidental/pemeriksaan mendadak, pengawasan secara mendadak dilakukan pada setiap saat sesuai dengan kebutuhannya.

d. *Monitoring* Perkreditan

Monitoring perkreditan dilakukan oleh bank baik secara ekstern maupun intern. Informasi dari pihak ekstern dan pihak intern bank yang diperlukan dalam melakukan *monitoring* perkreditan adalah:

- 1) Informasi dari luar bank (ekstern)
- 2) Informasi dari dalam bank (intern)

Informasi yang diperoleh baik dari pihak intern maupun ekstern harus digabungkan guna untuk memperoleh persoalan pokok yang dihadapi oleh debitor. Pencarian informasi tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menentukan langkah penanganan yang perlu diambil sehingga persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan.

8. Aspek pengawasan Kredit

Aspek-aspek pengawasan kredit dapat digolongkan menjadi dua, (Muljono,2001:493) yaitu:

- a. Pengawasan syarat-syarat materil/kuantitatif dalam pemberian kredit. Bank dalam memberikan fasilitas kredit mempunyai kriteria-kriteria tertentu terhadap nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin agar tujuan pemberian kredit tersebut dapat tercapai dengan baik dan memenuhi kriteria:
 - 1) Nasabah dapat membayar kembali/pelunasan hutang pokok dan dengan bunga serta lain-lain kewajiban kepada bank sesuai dengan waktu dan tata cara yang telah ditetapkan.
 - 2) Nasabah dapat mengembangkan usahanya setelah menerima kredit, maka syarat-syarat format/kuantitatif/proseduril tersebut di atas harus diimbangi dengan dipenuhinya syarat-syarat materil/kuantitatif dalam pemberian kredit.
- b. Pengawasan Administrasi Perkreditan
Pengawasan administrasi bertujuan untuk memastikan kebenaran dan ketelitian data administrasi. Keuntungan dari pengawasan administrasi perkreditan yaitu:
 - 1) Dari data administrasi akan dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan operasional yang terjadi.
 - 2) Dari data administratif akan merupakan umpan balik bagi manajemen untuk penentuan kebijakan (*policy*) di kemudian hari. Untuk keperluan pengawasan kredit, lingkup kegiatan pengawasan administasi dibagi dalam dua kelompok, yaitu:
 - 1) Kegiatan administrasi nasabah secara individual yang antara lain meliputi:
 - a. Laporan kegiatan nasabah
 - b. Prima nota debitor/mutasi Rekening Koran
 - c. Buku debitor/ kartu debitor/ *spread sheet* dan lain-lain.
 - d. Arsip map-map debitor
 - 2) Kegiatan nasabah secara kelseluruhan:
 - a) Tingkat *colectibility*
 - b) Laporan perkreditan
 - c) Pendapatan perkreditan
 - d) Data pembukuan
 - e) Asuransi Perkreditan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek pengawasan kredit adalah adanya administrasi kredit yang memadai, nasabah yang menyampaikan laporan kredit secara berkala, adanya konsultasi terstruktur antara pihak bank dan debitor dalam mengatasi problem kredit, adanya sistem

peringatan pada administrasi bank yang dikelola oleh bagian perkreditan untuk menangani apabila ada nasabah yang mulai bermasalah.

E. Kredit Bermasalah

1. Pengertian Kredit Bermasalah

"Kredit bermasalah adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh debitor bersangkutan" (Hasibuan, 2007:115). Sedangkan Arthesa (2006:181) mengemukakan bahwa kredit bermasalah secara umum adalah kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standart kualitas yang telah ditetapkan oleh bank. Sehingga dapat disimpulkan mengenai pengertian kredit bermasalah di atas yaitu dimana kredit yang pembayarannya tidak lancar yang disebabkan adanya ketidakmampuan debitor untuk membayar kewajibannya kepada bank, kredit bermasalah ini mengandung risiko yang tinggi dan tidak memenuhi standart kualitas yang ditetapkan oleh bank.

Kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank dan kesehatan kualitas *asset* bank. Kredit bermasalah ini dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP Tanggal 31 Maret 2010, kredit bermasalah *Non Performing Loan* dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{NPL} : \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank menetapkan

bahwa rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) pada setiap bank tidak boleh melebihi ketetapan maksimal, dari Bank Indonesia yaitu 5%, apabila lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan maka bank tersebut dianggap tidak sehat. NPL yang dimiliki suatu bank semakin meningkat maka akan menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank.

2. Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah dialami hampir seluruh bank yang memberikan kredit kepada nasabahnya. Kredit yang bermasalah harus segera disikapi dengan serius, karena apabila kredit yang macet semakin besar, maka akan menimbulkan potensi kerugian yang besar pula bagi bank. Menurut Kasmir (2006:128) macetnya suatu fasilitas kredit dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu:

- a. Dari pihak Perbankan
Pihak bank dalam melakukan analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.
- b. Dari pihak Nasabah
Dari pihak nasabah kemacetan dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:
 - 1) Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
 - 2) Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran dan sebagainya, sehingga kemampun untuk membayar kredit tidak ada.

Pemberian suatu fasilitas kredit tidak mungkin lepas dari permasalahan kredit atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh

beberapa faktor meliputi faktor ekstern dan intern, yang antara lain dikarenakan oleh manajemen bank, oleh debitor sendiri, ataupun faktor lainnya.

3. Teknik Mengatasi Kredit Bermasalah

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kredit bermasalah dan apabila kredit bermasalah tersebut telah berubah menjadi benar-benar macet akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Dalam hal ini, bagaimana bank meminimalkan risiko tersebut seminimal mungkin. Maka pihak bank harus segera melaksanakan teknik-teknik untuk melakukan penyelamatan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Menurut Kasmir (2006:128) penyelamatan dapat dilakukan dengan beberapa teknik antara lain :

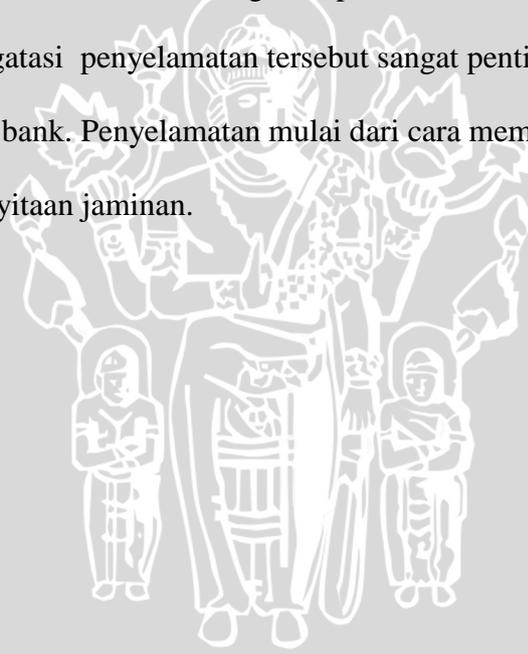
- a. *Rescheduling*
Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitor diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit. Pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitor mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- b. *Reconditioning*
Maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan hutang pokok, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, pembebasan bunga. Pengubahan persyaratan diberikan kepada debitor yang jujur, terbuka dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan tetapi diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan.
- c. *Restructuring*
Merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi, dengan menambah jumlah kredit, dengan menambah *equity* (dengan menyeter uang tunai, tambahan dari pemilik).
- d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Retructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang dan modal ditambah.

e. Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Kredit bermasalah memang bukan merupakan permasalahan yang baru dalam perkreditan. Tetapi hal tersebut juga harus segera diatasi agar tidak berkelanjutan. Adanya kredit bermasalah dalam suatu fasilitas kredit, maka sangat diperlukan teknik dalam mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa teknik untuk mengatasi penyelamatan tersebut sangat penting diterapkan atau dilaksanakan oleh bank. Penyelamatan mulai dari cara memperpanjang jangka waktu sampai penyitaan jaminan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan tepat dan akurat serta efisien, sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenaran analisis data secara ilmiah. Cara ilmiah sangat penting untuk menentukan arah penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Tujuan penelitian digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah pada sistem pemberian kredit.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan perumusan masalah serta teori-teori yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2014:75), "penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan data dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu". Penelitian dengan pendekatan studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti serta interaksi dengan lingkungan (Indrianto dan supomo, 2002:26).

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mempelajari secara khusus suatu obyek pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (persero) Tbk Capem Wates Kabupaten Kediri yang kaitanya dalam usaha untuk meminimalkan terjadinya kredit bermasalah. Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan penelitian pada studi kasus.

B. Fokus Penelitian

Perlunya fokus penelitian adalah untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak terlalu luas. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat menelaah atau menganalisis objek penelitian secara lebih mendalam dan terfokus, tidak melebar ke hal-hal yang tidak atau kurang relevan, sehingga dengan adanya fokus penelitian akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang sudah dirumuskan. Berdasarkan uraian diatas, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan pengawasan pemberian Kredit Modal Kerja pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (persero) Tbk Cabang Pembantu Wates sebagai upaya untuk meminimalisir kredit bermasalah.
2. Mengevaluasi kredit bermasalah pada Kredit Modal Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan. Penelitian dilakukan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (persero) Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri yang terletak di jalan Tawang No. 150 Kec Wates Kabupaten Kediri. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang berada di kabupaten Kediri ini memiliki beberapa Cabang Pembantu disetiap kecamatan seperti Cabang Pembantu yang ada di wates yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian oleh peneliti. Lokasi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri yang sangat

strategis, sangat membantu masyarakat wates untuk lebih mudah mengenal dan mengetahui keberadaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Wates. Sebagai salah satu lembaga keuangan bank yang berorientasi mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan disegala bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan taraf hidup rakyat yang salah satunya adalah dengan menyalurkan kredit modal kerja kepada perusahaan atau perorangan yang membutuhkan dana.

D. Sumber Data

Arikunto (2006:129) mengemukakan bahwa "Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh". Berdasarkan dengan sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian menyangkut topik yang dibahas, maka data atau informasi yang diperoleh peneliti dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (tidak melalui media perantara). Data primer ini dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kekuatan, dan hasil pengujian sumber data yang berkepentingan adalah bagian perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (persero) Tbk Cabang Pembantu Wates.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung lain atau lewat dokumen. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau memberikan data kepada pengumpul data (peneliti), misalnya lewat orang laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa mengenai profil bank, data berupa jumlah kredit, dan data mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku pada bank.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam penelitian karena dapat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Teknik pengumpulan data ini berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyelesaikan skripsi ini adalah:

1. *Interview* (wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dalam kegiatan ini dilakukan dengan bagian-bagian yang terkait atas topik yang menjadi pembahasan skripsi ini, yaitu pada bagian perkreditan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates. Pada bagian kredit ini peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui mengenai kredit modal kerja yang ada di Bank

Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari atau dengan menggunakan dokumen atau catatan yang terkait dengan pengawasan pemberian kredit modal kerja yang disediakan oleh bank tersebut.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data dan informasi serta untuk menggali suatu data. Informasi yang diperlukan pada waktu penelitian yaitu dengan menggunakan sebuah metode yang berkaitan dengan jenis penelitian atas topik yang digunakan. Sesuai dengan metode pengumpulan data, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara merupakan pedoman dengan berupa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber yang bertugas di bagian kredit.

2. Pedoman dokumentasi

Pedoman dokumentasi merupakan sebuah pedoman yang didalamnya berupa dokumen-dokumen yang telah ada dan yang digunakan dalam proses operasional dilokasi penelitian. Pedoman ini yang nantinya dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai topik tujuan peneliti.

G. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dalam proses ini data yang telah dikumpulkan akan dianalisis lebih lanjut untuk menjadi suatu informasi yang berguna. Analisis data bertujuan untuk membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun dan lebih berarti di dalam menerapkan suatu prosedur pemberian kredit serta pengawasan kredit.

Proses dalam analisis data ini merupakan usaha untuk menemukan jawaban yang ingin diperoleh selama melakukan penelitian. Dengan demikian analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena dalam melakukan analisis tersebut dapat memecahkan sebagian atau seluruh masalah.

Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan pengawasan pemberian kredit modal kerja yang ditinjau dari prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates dimulai sejak pra realisasi kredit sampai dengan debitor melunasi kredit.
2. Evaluasi kredit bermasalah pada Kredit Modal Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates pada 3 (tiga) periode yaitu 2013, 2014 dan 2015.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Perusahaan

1. Sejarah singkat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank JATIM, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Kota Surabaya yang merupakan ibukota provinsi Jawa Timur. Landasan hukum pendirian adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Bank Usaha Milik Daerah (BUMD).

Peraturan Pemerintahan Daerah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1997 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C no.1/c tanggal 1 Februari 1997. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa perubahan, dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1996, Tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh

Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 Tanggal 21 April 1997.

Seiring perkembangannya yang secara operasional, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur melakukan peningkatan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Selain itu Bank JATIM melakukan strategi untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu merubah Struktur Permodalan/Kepemilikan dengan diijinkannya modal saham dari pihak ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari

Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Yulistyo, S.H Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2006 tercantum dalam akta dihadapan Notaris Adengan penambahan kegiatan Unit Usaha Syariah dan perubahan jumlah saham seri A dan seri B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan NO.W10-00182.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 february 2007. Perubahan pada tahun 2007 berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C-07001HT.01.04-TH 2007 tanggal 17 Desember 2007.

Tahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang dituangkan dalam akta No.56 tanggal 27 April 2008 yang dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B dan juga penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-undang No.40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, yang diperbarui dalam Akta No.38 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat hadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15113.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 23 April 2009.

Selanjutnya Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk disingkat menjadi PT Bank Jatim Nomor AHU-AH.01.10-31887 tanggal 31 Agustus 2012.

Perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07 Mei 2013 Nomor 37 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 29772/2013, serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor Tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pendaftaran dan kemudian pada tanggal 12

Juli 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk mencatatkan 20% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau menjadi perseroan terbuka dan perubahan nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

2. Visi dan Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim)

Tbk.

a. Visi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Tbk.

Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional. Artinya dalam menjalankan bisnis dan mengembangkan usaha Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur secara sehat serta untuk memperoleh hasil yang optimal. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berupaya melaksanakan kegiatannya dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia dengan integritas dan loyalitas yang tinggi, mempunyai jiwa melayani dan bertindak profesional.

b. Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Tbk

Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal. Artinya peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah merupakan tujuan umum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang diaplikasikan dalam pemberian bantuan permodalan bagi usaha-usaha yang produktif baik dalam bidang UMKMK maupun usaha

berskala besar, disamping itu berupaya memperoleh laba yang optimal merupakan tujuan yang diharapkan agar semakin menambah kepercayaan stakeholder terhadap kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

3. Motto PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Tbk

Dalam meningkatkan eksistensi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ditetapkan motto " Bersama Kami Berkembang Pasti " yang artinya dimana dalam rangka mengangkat kebersamaan antara nasabah dan Bank Jatim untuk berkembang kearah yang lebih baik diperlukan keharmonisan diantara keduanya, sehingga Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur memberikan komitmen untuk membantu setiap nasabah yang mempercayakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan untuk berkembang menuju kehidupan yang lebih baik.

4. Slogan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timut (Bank Jatim) Tbk

"Bank Jatim Banknya Masyarakat Jawa Timur" Artinya Bank Jatim mempunyai niatan untuk mensejahterakan para pemilik, nasabah, seluruh karyawan dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya dengan disertai tanggung jawab, dedikasi, integritas, profesionalisme yang tinggi dari masing-masing proposal.

5. Bidang Usaha PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (persero) Tbk

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dll.



- b) Memberikan kredit untuk masyarakat terdiri dari kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Multiguna (KMG) dan Produk kredit yang lainnya.
- c) Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang.
- d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah.
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f) Menempatkan dana, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada pihak lain baik dengan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, cek atau sarana lain.
- g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau nasabah antar pihak ketiga.
- h) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek.
- i) Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik didalam maupun luar negeri.

6. Lokasi Perusahaan

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (persero) Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri bertempat di jalan Tawang No. 150 Kecamatan Wates memiliki tempat yang sangat strategis karena tempatnya

dipingir jalan dan merupakan jalan utama (jalan raya). Sangat membantu masyarakat wates untuk lebih mudah mengenal dan mengetahui keberadaan Bank Jatim Cabang Pembantu Wates, dan jumlah penduduk yang kebanyakan memiliki usaha perdagangan memberikan keuntungan bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates untuk meningkatkan pemberian Kredit Modal Kerja.

7. Produk Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk

a. Produk Dana

1) Simpeda

Simpanan pembangunan daerah yang sudah *on-line real time* diseluruh Cabang Bank Jatim, tabungan yang bunganya dihitung harian, memberi banyak kemudahan, dan manfaat dengan biaya ringan, hadiah berupa uang tunai dan barang yang diundi 3 (tiga) kali dalam setahun, setoran pertama minimal Rp 50.000, saldo yang tersisa setiap dilakukan pengambilan minimal Rp 50.000, biaya administrasi per bulan Rp 2.500,- tanpa ATM dan bila memiliki ATM biaya administrasi ditambah Rp 3000,- menjadi Rp 5.500.

Keuntungan :

- a) Aman dengan tingkat suku bunga yang bersaing
- b) Bebas biaya setor dan tarik di semua cabang
- c) Bunga harian sebesar 2.75%

2) Siklus

Tabungan siklus (Tradisi Keluarga Sejahtera) dimana dengan tabungan ini Bank Jatim ingin turut serta menumbuh kembangkan

tradisi menabung sebagai wujud awal menuju keluarga sejahtera.

Tabungan ini dapat dimiliki perorangan maupun untuk badan hukum, yayasan dan lembaga lainnya. Setoran awal minimal Rp 100.000, biaya administrasi per bulan Rp 5.000.

Keuntungan :

- a) Dapat dilakukan penarikan dan penyetoran di seluruh Cabang Bank Jatim.
- b) Bebas biaya setor dan tarik di semua cabang.
- c) Tingkat suku bunga dihitung berdasarkan saldo harian yaitu sebesar 2,25%
- 3) Tabunganku

Tabunganku adalah simpanan perorangan dengan persyaratan mudah yang diterbitkan secara bersama oleh bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp 20.000,- dan selanjutnya Rp 10.000.

Keuntungan :

- a) Bebas biaya administrasi bulanan
- b) Suku bunga bersaing dihitung harian
- c) Saldo Rp 0,- s/d Rp 500.00,- tidak dapat bunga
- d) Saldo Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,- sebesar 0,25% per tahun
- e) Saldo > Rp 1.000.000,- sebesar 1% per tahun

f) Tabunganku dapat menggunakan ATM dengan biaya administrasi Rp 3.000,- per bulan.

4) Tabungan Haji

Produk tabungan yang meringankan langkah menuju Baitullah, dengan menabung di tabungan haji memantapkan ketangguhan hati menyambut dan memenuhi panggilan ilahi menuju tanah suci Mekkah Al Mukarromah.

Keuntungan :

- a) Penyetoran dapat dilakukan diseluruh Cabang Bank Jatim
- b) Tabungan haji tidak dapat diambil sewaktu-waktu kecuali, untuk pembayaran pelunasan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji.
- c) Jasa manfaat yang diberikan pada saat akan menuaikan ibadah haji.
- d) Biaya provisi plafond dibawah Rp 10 juta : Rp 125.000/bulan
plafond diatas Rp 10 juta : Rp 150.000/bulan.

5) Deposito Berjangka

Jenis simpanan yang mempunyai spesifikasi yang tidak dimiliki oleh produk simpanan lainnya, memberikan keuntungan suku bunga yang kompetitif dan jangka waktu yang sesuai dengan pilihan. Yang sangat tepat untuk perorangan maupun perusahaan, bagi para pemilik deposito berjangka otomatis (ARO) tidak perlu datang ke kantor bank untuk memperpanjang bila jatuh tempo, yang lebih praktis dan hemat waktu. Pencairannya tergantung dari kesepakatan yang telah ditetapkan

sebelumnya, pihak yang dapat mencairkan deposita berjangka hanya pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito berjangka tersebut, dan deposito berjangka tidak dapat dipindahtangankan atau diperjual belikan. Jangka waktu deposito bervariasi yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan.

Keuntungan :

- a) Tingkat suku bunga yang beragam dan kompetitif, yang disesuaikan dengan jumlah dana yang didepositokan dan pilihan jangka waktu yang dipilih.
- b) Terdapat fasilitas perpanjangan otomatis (ARO), jadi tidak perlu repot datang ke bank hanya untuk melakukan perpanjangan simpanan berjangka yang dimiliki.
- c) Deposito berjangka dapat diajukan oleh perorangan atau perusahaan.
- d) Dapat dijadikan jaminan kredit di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
- 6) Giro

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan warkat, yang banyak memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam setiap transaksi keuangan. Sebagai usahawan untuk kebutuhan transaksi sehari-hari tentu lebih aman bila tanpa harus membawa uang tunai, cukup menggunakan Cek/Bilyet Giro sebagai sarana melakukan transaksi.



b. Produk Kredit

1) Kredit Multiguna

Pemberian kredit untuk segala keperluan selama tidak bertentangan dengan anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap. Diperuntukan bagi Pegawai Negeri (PNS/CPNS) yang gajinya dibayarkan melalui Bank Jatim atau telah ada kerjasama MOU dengan bank jatim.

Keuntungan :

- a) Mengatasi kesulitan kebutuhan dana yang sangat mendesak.
- b) Proses mudah / tidak berbelit-belit dan cepat.
- c) Memberikan keleluasaan dalam mengatur keuangan.
- d) Dapat dikompensasi sesuai kebutuhan.
- e) Plafond disesuaikan dengan besar penghasilan.
- f) Maksimal plafond kredit lebih dari Rp 100.000.000 dengan catatan angsuran tidak melebihi 80% gaji yang diterima.
- g) Maksimal angsuran 80% dari gaji untuk PNS 50% dari Gaji untuk CPNS.
- h) Jangka waktu bisa sampai 10 tahun untuk PNS dan 5 tahun CPNS.

2) Kredit Pundi Kencana

Kredit yang diberikan untuk pemberdayaan dan pembinaan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 serta untuk membantu permodalan dan memberi kesempatan yang lebih baik bagi

kelompok/koperasi atau perorangan dimana debitur wajib menabung dengan nilai yang tetap sesuai kesepakatan. Sasaran kredit yaitu pengusaha skala mikro.

Keuntungan :

- a) Memberdayakan pengusaha kecil sebagai penggerak perekonomian di daerah.
 - b) Plafond maksimal Rp 500.000.000
 - c) Jangka waktu kredit modal kerja maksimum 3 tahun, kredit investasi maksimum 5 tahun.
- 3) Kredit Langsung Berguna (Laguna)

Diberikan kepada usaha mikro guna pengembangan usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan secara langsung kepada perorangan atau kelompok usaha. Kredit laguna diberikan dalam bentuk angsuran dan rekening kora. Jenis kredit laguna antara lain:

- a) Kredit Mikro Laguna I

Mempunyai hasil usaha harian maksimal Rp 500.000,- dapat diberikan plafond kredit < Rp 5.000.000,- dengan jangka waktu kredit bentuk angsuran maksimal 3 tahun.

- b) Kredit Mikro Laguna II

Mempunyai hasil usaha harian diatas Rp 500.000 sampai dengan Rp 2.500.000,- , dapat diberikan plafond kredit > Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 25.000.000,- dengan jangka waktu kredit

bentuk angsuran 3 tahun dan kredit investasi maksimal 5 tahun dengan *Grace Period* 3 Bulan.

c) Kredit Mikro Laguna III

Mempunyai hasil usaha harian > Rp 2.500.000,- dapat diberikan plafond kredit > Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- dengan jangka waktu kredit bentuk angsuran 3 tahun dan kredit investasi maksimal 5 tahun dengan *Grace Period* 3 bulan.

4) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit yang ditujukan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak, dimana dijamin oleh perusahaan penjaminan. Kredit KUR diberikan dalam bentuk modal kerja jangka waktu maksimal 3 tahun, dan investasi dengan jangka waktu maksimal 5 tahun.

5) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

a) Kredit KPR Umum

Diberikan kepada masyarakat untuk membiayai kepemilikan rumah dari pengembang atau perseorangan yang digunakan untuk pembelian rumah dan ruko, pembangunan rumah dengan tanah milik sendiri, perbaikan dan renovasi rumah milik sendiri termasuk KPR swadaya yang dananya bersumber dari bank.

b) KPR Bersubsidi

Adalah kredit yang diterbitkan oleh bank jatim kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan rumah sederhana sehat yang dibeli dari pengembang.

c. Produk Jasa

1) Referensi Bank

Surat pernyataan yang dikeluarkan Bank Jatim, yang menerangkan bahwa orang / perusahaan yang mengajukan adalah benar-benar nasabah Bank Jatim. Referensi digunakan oleh nasabah untuk mengikuti pelelangan proyek tertentu, meningkatkan kepercayaan yang diperlukan oleh rekan bisnis.

2) RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Sistem tranfer dana berbasis RTGS yang memungkinkan bank dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran/ tranfer dana secara elektronik dalam waktu seketika online dan penyelesaian transaksi secara terpadu. Keuntungan dari produk jasa ini yaitu waktu pengiriman cepat, pemindahan dana dengan aman dan mudah, memberikan kemudahan dalam transaksi pengiriman uang atau pembayaran dalam mata uang rupiah dengan biaya yang kompetitif.

3) Inkaso



Adalah penagihan yang dilakukan oleh bank/ nasabah dalam hal ini nasabah cukup menyerahkan amanatnya kepada bank untuk menagihkan kepada pihak lain/bank lain.

Warkat inkaso sendiri adalah warkat yang diterbitkan oleh Kantor Cabang Bank yang wilayah kliringnya berbeda dengan wilayah kliring bank pengirim yang lain.

Warkat inkaso bank lain adalah warkat yang diterbitkan oleh bank lain yang wilayah kliringnya berbeda dengan wilayah kliring bank pengirim itu sendiri.

4) Giralisasi

Adalah pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yang dilakukan secara otomatis oleh bank dengan melakukan pendebitan rekening giro/tabungan nasabah sesuai dengan surat perintah pendebitan yang telah ditandatangani oleh nasabah. Keuntungan giralisasi ini yaitu dapat membantu penyelesaian transaksi pembayaran secara praktis dan efisien, nasabah tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan transaksi.

5) Layanan Pajak

Adalah salah satu jenis layanan yang diberikan oleh bank jatim kepada nasabah. Layanan pajak ini berkaitan dengan status bank jatim sebagai bank operasional V atau sebagai bank persepsi dan bank wajib pungut. Sistem layanan online telah disahkan oleh dirjen pajak pusat dan diakui keabsahannya. Keuntungan layanan pajak dapat memberikan

kemudahan kepada nasabah untuk membayar pajak PBB melalui ATM Bank Jatim dengan mengisi no NOP (Nomor Objek Pajak).

6) Gaji Kolektif

Adalah layanan yang diberikan oleh bank jatim kepada perusahaan atau instansi yang menjadi nasabah giro maupun tabungan berupa kemudahan pembayaran gaji kepada perusahaan tersebut. Layanan gaji ini dapat dilakukan dengan membayar semua gaji secara keseluruhan maupun dapat dilewatkan ke rekening masing-masing pegawai kepada perusahaan tersebut.

Layanan gaji kolektif / *upload* gaji bertujuan untuk meringankan tugas bendahara sebagai juru pembayar gaji, dan bendahara akan terhindar dari permasalahan selisih kurang atau lebih atas gaji yang dibayarkan kepada pegawai, sehingga segala administrasi yang berhubungan dengan pembayaran gaji dapat diselesaikan pada hari pembayaran gaji semisal tanggal 1 pada saat pembayaran gaji.

7) *Safe Deposito Box*

Bank jatim menyediakan fasilitas untuk menyimpan barang-barang, surat-surat berharga maupun dokumen penting. Dengan SDB tersebut nasabah dapat menyimpan barang-barang/surat-surat berharga dengan rasa aman dan bank jatim juga menjaga kerahasiaanya.

8) *SMS Banking*

Merupakan terobosan baru dalam dunia perbankan, yang memudahkan anda dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari

tanpa harus meninggalkan pekerjaan serta aktivitas. Bank jatim menyediakan produk nasabah untuk melakukan transaksi dan memperoleh informasi hanya dengan *handphone*. Keuntungan SMS *Banking* dapat melakukan transaksi kemanapun dan dimanapun berada, efektif dan efisien dan dapat mengakses fitur-fitur produk yang baru.

9) Info Bank Jatim (*Call Center*)

Info Bank Jatim adalah *call center* bank jatim dengan dial 14044, cukup dengan telepon rumah sambil istirahat dan dimanapun berada dengan menggunakan *handphone* dapat memperoleh informasi produk Bank Jatim dan bertransaksi. Keuntungan bisa menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu berkunjung ke kantor pada hari kerja, dapat menghubungi jam berapapun karena info bank jatim buka 24 jam.

B. Penyajian Data

1. Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk

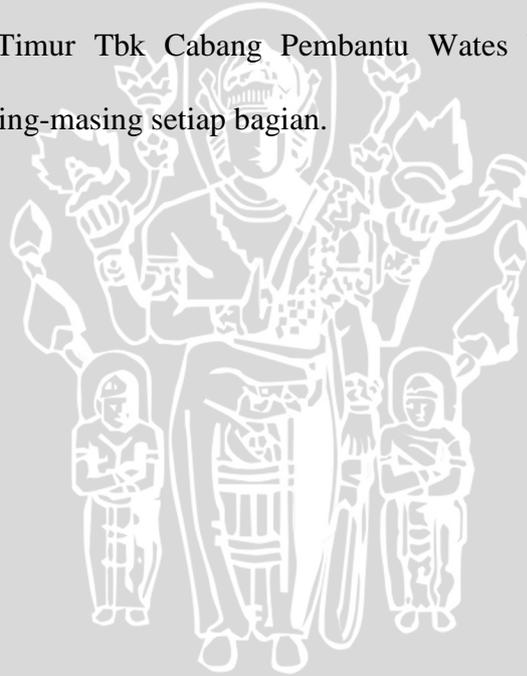
a. Struktur Organisasi

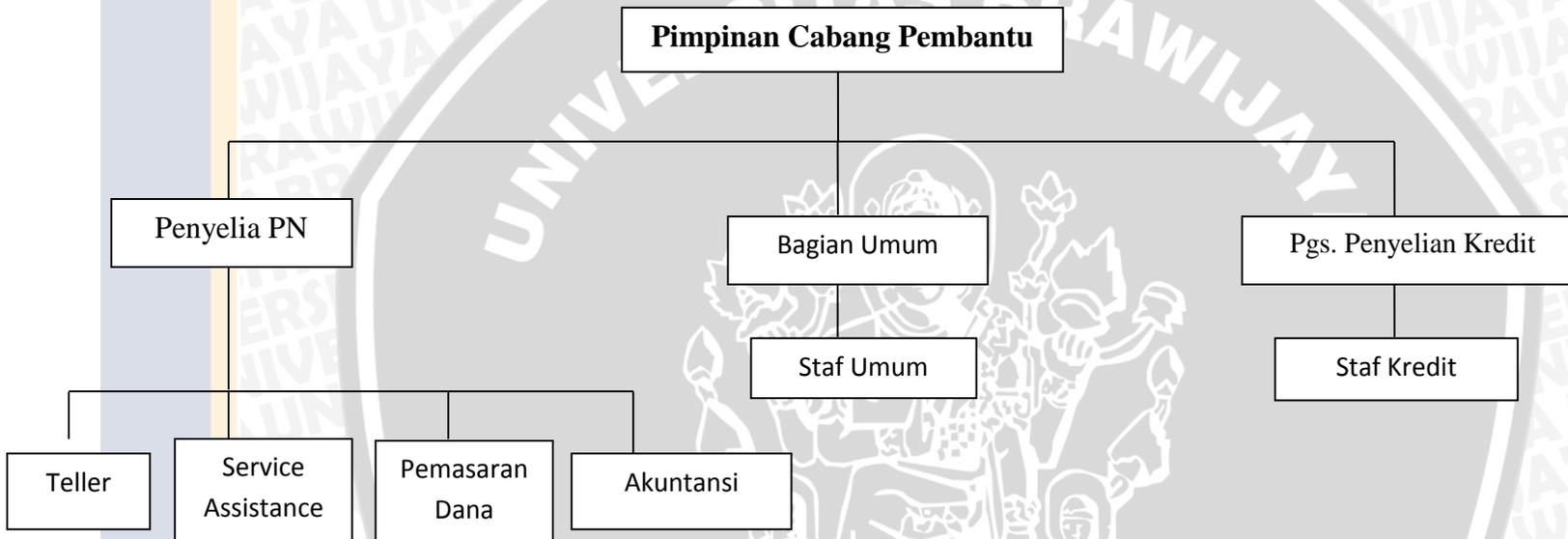
Struktur organisasi merupakan kerangka dari hubungan antara bagian-bagian yang mana terjalin dalam suatu sistem interaksi yang saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain. Struktur organisasi yang tepat merupakan sebagai suatu alat yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan sebab berhasil tidaknya suatu perusahaan ditentukan oleh struktur organisasi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Struktur organisasi juga menunjukkan

spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Dengan adanya struktur organisasi, diharapkan adanya pembagian kerja, kewajiban dan kegiatan-kegiatan yang dimiliki oleh masing-masing orang yang ada didalamnya sehingga menjadi jelas dan teratur. Struktur organisasi ini mempunyai peran yang sangat besar dalam mengatur dan mengelola suatu perusahaan secara sistematis.

Berikut ini merupakan struktur organisasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Wates beserta tugas dan wewenang masing-masing setiap bagian.





Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates

Sumber : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk. Cabang Pembantu Wates

2. *Job Description* Struktur Organisasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates

Penugasan merupakan unsur yang paling utama di dalam suatu perusahaan yang merupakan tonggak dari operasional perusahaan. Dalam pemberian penugasan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates sebagai perusahaan jasa yang menerapkan sistem penugasan yang disesuaikan dengan kemampuan dari para pekerja di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates terus mengembangkan potensi dari pekerja dengan memberikan pelatihan dan penerapan sistem perputaran jabatan yang dilakukan dengan melakukan rotasi jabatan tingkat ke tingkat yang sama, ke tingkat yang lebih tinggi atau ketingkat yang lebih rendah dari jabatan sebelumnya. Disesuaikan dengan *job description*, berikut ini adalah penjabaran dari *job description* pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates sebagai berikut :

a. Pemimpin Cabang Pembantu

- 1) Membantu kantor cabang dalam memasarkan produk dan jasa bank pada masyarakat.
- 2) Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta undang-undang yang berlaku.
- 3) Membantu kantor cabang dalam memberikan kontribusi yang nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

- 4) Membantu kantor cabang dalam memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap laba bank secara keseluruhan.

b. Penyelia PN (Pelayanan Nasabah)

- 1) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.
- 3) Mengembangkan sistem dan prosedur terkait proses yang berada dibawah cakupan wewenangnya.
- 4) Menyetujui penarikan tunai atau non yang lazim atas rekening nasabah dalam batas kewenangan yang diberikan direksi.

(a). Teller

- (1) Melayani transaksi pembayaran dan setoran uang nasabah
- (2) Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai dengan ketentuan.
- (3) Membuat laporan keadaan uang kas.
- (4) Memastikan kelengkapan bukti kas tuna yang ada dalam pengawasan.

(b). Service Assistance

- (1) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.

- (2) Melayani permintaan informasi perbankan dari konsumen yang datang.
- (3) Membantu nasabah dalam menangani masalah yang timbul terkait dengan produk dana/jasa bank.

(c).Pemasaran Dana

- (1) Membantu pekerjaan penyelia pemasaran dana dalam menghimpun dana dan mengelola produk dana.
- (2) Melakukan mapping sasaran nasabah potensial yang telah dianalisis oleh penyelia mendatangi langsung calon nasabah ke tempat nasabah dana bank.
- (3) Menyebarluaskan informasi mengenai produk dana kepada calon nasabah.

(d).Akuntansi

- (1) Menyelenggarakan pembukuan dan transaksi-transaksi
- (2) Mengelola finance dan accounting kantor cabang pembantu
- (3) Mencetak dan membuat laporan operasional bank di kantor cabang pembantu

c. Bagian Umum

- 1) Melakukan pemantauan atas kepegawaian di dalam sebuah instansi
- 2) Melengkapi atas keperluan atau kebutuhan yang dibutuhkan dalam perusahaan.



d. Pengganti Sementara (Pgs) Penyelian Kredit

- 1) Melakukan pemantauan atas transaksi nasabah yang akan melakukan pengajuan kredit dengan cara melakukan pengamatan tentang kriteria yang sesuai dengan ketentuan bank seperti dengan melihat karakteristik pelunasan kredit dalam jumlah besar dan melihat sumber dana yang diperoleh yang akan digunakan dalam pelunasan perjanjian kredit.
- 2) Memastikan bahwa unit kerja dibawah tanggung jawabnya telah melaksanakan penerapan identifikasi kelayakan nasabah atas pengajuan kredit yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh bank tersebut.
- 3) Menyetujui permohonan pinjaman apabila nasabah dinyatakan layak untuk mendapatkan pinjaman tersebut.

(a) Staf Pemasaran Kredit

- (1) Menawarkan produk dan memasarkan kredit secara langsung mendatangi nasabah.
- (2) Melakukan *survey* langsung kepada nasabah yang mengajukan kredit di bank.
- (3) Membantu nasabah kredit yang akan mengajukan kredit dalam menjelaskan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dalam mengajukan kredit.



(b) Staf Analis Kredit

- (1) Memproses pengajuan kredit dan menyimpan berkas-berkas.
- (2) Menyusun proposal analisa dan kesepakatan permohonan dana, jasa dan kredit.
- (3) Mengelola daftar hitam nasabah kredit.

3. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan sebuah fasilitas penyaluran dana dengan tujuan untuk membiayai keperluan kegiatan operasional usaha seperti halnya pengadaan kebutuhan bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi. Kredit modal kerja pada dasarnya telah memiliki banyak manfaat dan kelebihan diantaranya adalah jumlah pinjaman yang diberikan dapat disesuaikan dengan skala usaha dari nasabah atau calon debitur. Besar kecilnya jumlah Kredit modal kerja yang akan disalurkan oleh bank kepada calon debitur harus ditentukan sebelumnya, sehingga sesuai dengan jumlah kebutuhan debitur akan pemenuhan perkembangan dari sektor usahanya dimasa yang akan datang.

Persyaratan pengajuan kredit modal kerja pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP)
- b. Fotocopy KTP (fotocopy suami istri apabila sudah menikah)
- c. Fotocopy kartu susunan keluarga (KSK)
- d. Fotocopy surat nikah (apabila sudah menikah)

- e. Pasfoto berwarna berukuran
- f. Fotocopy sertifikat yang dijaminan
- g. Fotocopy SPPT Pajak (terbaru)
- h. Fotocopy ijin usaha (NPWP, SIUP, TDP)
- i. Surat keterangan usaha yang diperoleh dari desa
- j. Fotocopy buku tabungan bank jatim a.n pemohon kredit

4. Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk kantor Cabang Pembantu Wates

Prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates dimulai dari pengajuan permohonan kredit sampai dengan proses realisasi kredit dan pencairan dana. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates memiliki tahapan dan proses dalam pemberian kreditnya. Berikut ini tahapan dan proses yang dilaksanakan untuk setiap pemohon (nasabah) yaitu sebagai berikut :

a. Pengajuan permohonan kredit

Proses awal pengajuan kredit terlihat bahwa dokumen yang dipergunakan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates menggunakan formulir berupa Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) disertai pelengkapan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan dalam pengajuan kredit. Prosedur pada saat pengajuan permohonan kredit Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates antara lain :

- 1) Bagian Admin & Pelaporan Kredit menerima formulir atau Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) beserta berkas-berkas persyaratan pengajuan kredit dari calon debitur yang telah menjadi ketentuan bank. Syarat pengajuan kredit modal kerja yang meliputi
 - a. Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP)
 - b. Fotocopy KTP
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga/KK
 - d. Fotocopy Surat Nikah
 - e. Fotocopy Sertifikat yang akan dijaminkan
 - f. Fotocopy SPPT Pajak (Terbaru)
 - g. Pas Foto berwarna ukuran
 - h. Fotocopy Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP)
 - i. Surat Keterangan Desa tentang sertifikat yang akan dijaminkan
 - j. Fotocopy Buku Tabungan Bank Jatim a.n Pemohon Kredit
- 2) Bagian admin & pelaporan kredit memeriksa kelengkapan seluruh berkas persyaratan kredit dari calon debitur. Apabila berkas yang diterima pihak bank sudah lengkap sesuai yang dipersyaratkan maka akan dilakukan ke tahap selanjutnya. Namun, apabila yang diterima apabila berkas belum lengkap atau belum sesuai ketentuan akan dikembalikan kepada calon debitur untuk dilengkapi.
- 3) Berkas yang telah lengkap akan diserahkan ke bagian umum (disposisi) ke penyelia operasional kredit untuk meminta persetujuan atas surat permohonan kredit yang disertai dokumen persyaratan.

- 4) Setelah penyelia operasional kredit telah menyetujui untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan kelengkapan berkas, kemudian diserahkan ke bagian analis kredit.

b. Analisis Kredit

Tahapan analisis kredit Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates melakukan 1 (satu) kali wawancara kepada nasabah, wawancara nasabah tersebut terjadi pada saat bagian analis kredit melakukan *On The Spot* ke lingkungan usaha calon debitur. Apabila terdapat kurangnya informasi pihak bank menghubungi melalui *telephone*.

Tahapan analisis kredit Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates, antara lain :

- 1) Bagian analis kredit melakukan pengecekan BI *Checking* pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia yaitu laporan yang berisi riwayat kredit/pinjaman nasabah kepada bank lain, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memastikan calon debitur tidak memiliki pinjaman di bank lainnya dan tidak termasuk daftar bermasalah. Apabila calon debitur termasuk dalam kedua kategori tersebut, maka pengajuan kredit tidak dapat dilanjutkan atau ditolak dan dokumen persyaratan administrasi dikembalikan. Sedangkan calon debitur yang tidak memiliki pinjaman dibank lain, maka pengajuan kredit dapat dilanjutkan dan diproses.

- 2) Analis kredit melakukan peninjauan di tempat usaha debitur (*On the*

spot).

- 3) Setelah melakukan *On the spot*, bagian analis kredit membuat laporan kunjungan nasabah pada lembar *Call Report Survey* (CRS) sesuai dengan keadaan nasabah yang sebenarnya.
- 4) Setelah melakukan peninjauan lokasi usaha dan membuat laporan hasil kunjungan, maka analis kredit melakukan evaluasi dan analisis berdasarkan dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditional*). Prinsip 5C yang ditetapkan dalam menilai kelayakan kredit oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates antara lain :

- a) *Character* (Watak)

Dasar dari penilaian watak dan sifat calon debitur digunakan untuk dijadikan ukuran tentang “kemauan” nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Penilaian karakter ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting sehingga tidak merugikan bank dikemudian hari.

- b) *Capacity* (Kemampuan)

Bank harus mengetahui kemampuan calon debitur dalam membayar atau mengembalikan hutangnya tepat pada waktu yang telah disepakati. Sehingga bank yakin bahwa dana yang dikeluarkan untuk membiayai usaha calon debitur dikelola oleh orang-orang yang tepat.

- c) *Capital* (Modal)

Bank melakukan analisis laporan keuangan dari usaha calon debitur, yaitu komposisi dari besar modal yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan, sehingga bank dapat mengetahui kemampuan permodalan calon debitur.

d) *Collateral* (Jaminan)

Bank melakukan analisis terhadap jaminan berupa agunan yang diserahkan oleh calon debitur dengan kualitas tinggi dan mudah untuk dicairkan, selain itu jaminan tersebut memiliki nilai minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya oleh bank. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko jika terjadi kredit bermasalah.

e) *Condition* (Kondisi)

Bank dalam hal ini akan melakukan analisis terhadap pengamatan perkembangan keadaan pasar di dalam maupun di luar lingkungannya, baik masa lalu atau masa yang akan datang. Kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

- 5) Setelah bagian analisis kredit selesai melakukan analisis dan evaluasi data nasabah, hasil tersebut akan direkomendasikan kepada pimpinan cabang pembantu untuk mendapatkan persetujuan kelanjutan proses kredit yang diajukan nasabah.

c. Putusan Kredit

- 1) Apabila pimpinan cabang pembantu setuju dengan hasil rekomendasi, maka pimpinan cabang pembantu akan membuat catatan kepada bagian administrasi kredit atas pembuatan formulir yang berupa putusan kredit (PTK) untuk putusan kredit yang diterima.
- 2) Sesuai dengan putusan pimpinan cabang pembantu, apabila kredit yang diajukan ditolak maka seluruh berkas akan dikembalikan ke penyelia kredit untuk tanda tangan persetujuan kredit dan kemudian diserahkan ke bagian analis kredit. Analis kredit akan menyerahkan kepada bagian administrasi kredit untuk membuat surat penolakan dengan disertai alasan penolakan. Sebaliknya, apabila pimpinan cabang pembantu menyetujui maka analis kredit akan melakukan pemeriksaan kembali atas kelengkapan berkas dan dokumen kredit.
- 3) Berkas pinjaman yang ditolak akan diproses oleh bagian administrasi kredit dan dikembalikan kepada calon debitur.

d. Pemberian Kredit

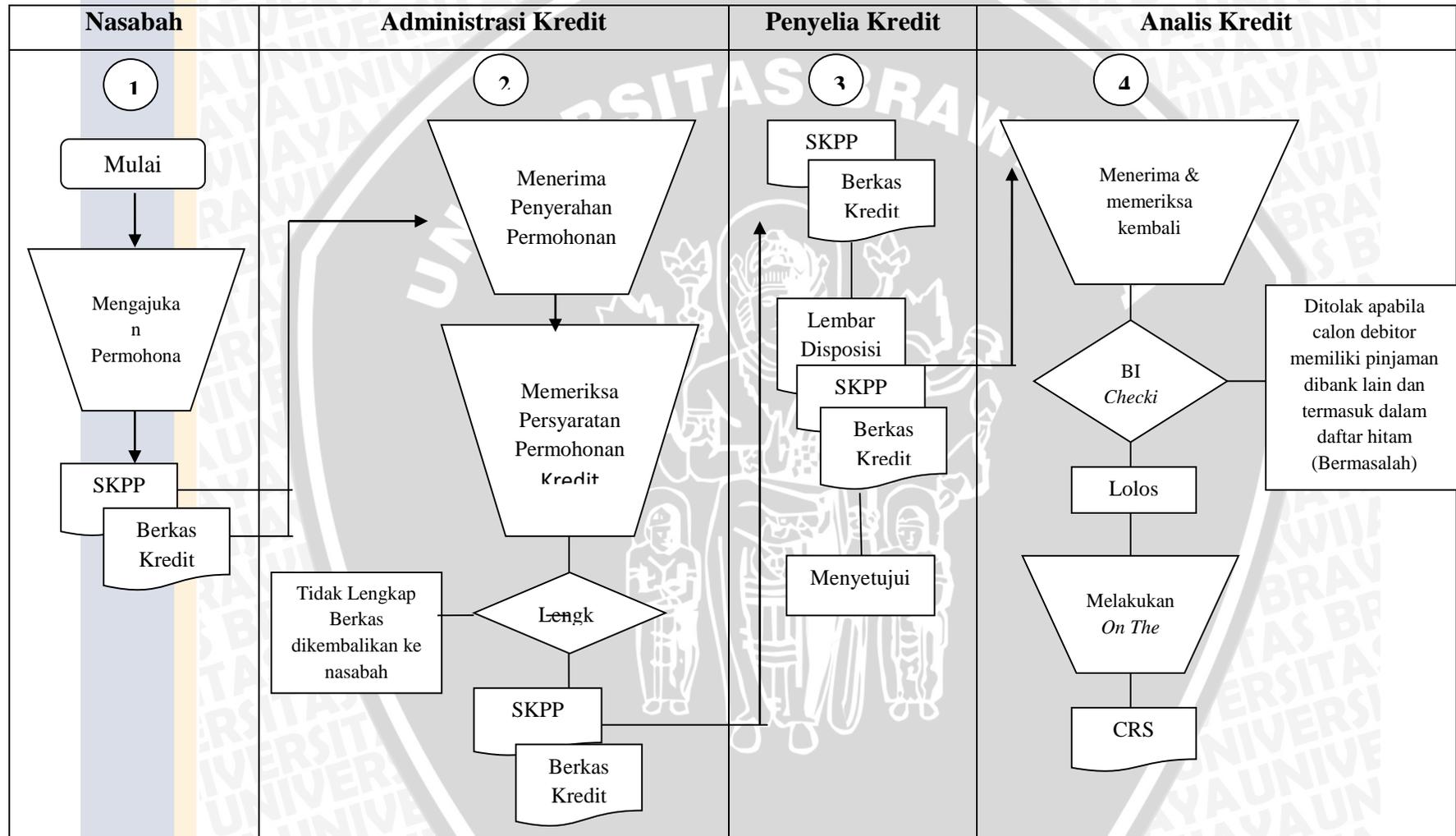
- 1) Bagian administrasi kredit melakukan aplikasi untuk data persetujuan (menginput data) nasabah yang disetujui pinjaman kreditnya oleh pihak bank, kemudian menerbitkan surat persetujuan pemberian kredit (SPPK), surat advis atau surat pengakuan hutang (SPH), surat perjanjian kredit, kwitansi pencairan (rangkap 3) dan tanda terima bukti agunan (rangkap 2).
- 2) Bagian admin kredit menghubungi nasabah untuk melakukan realisasi

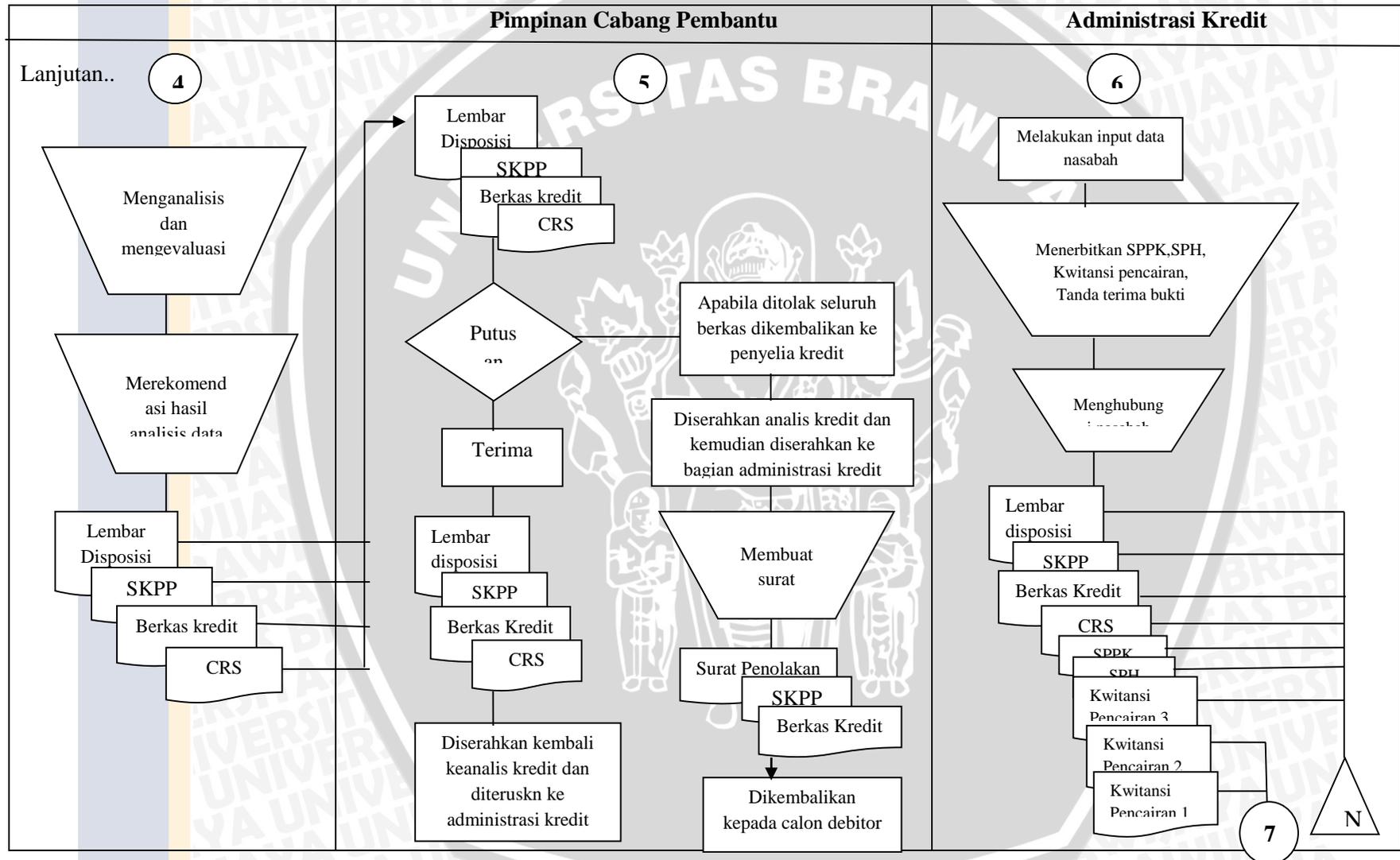
perjanjian kredit.

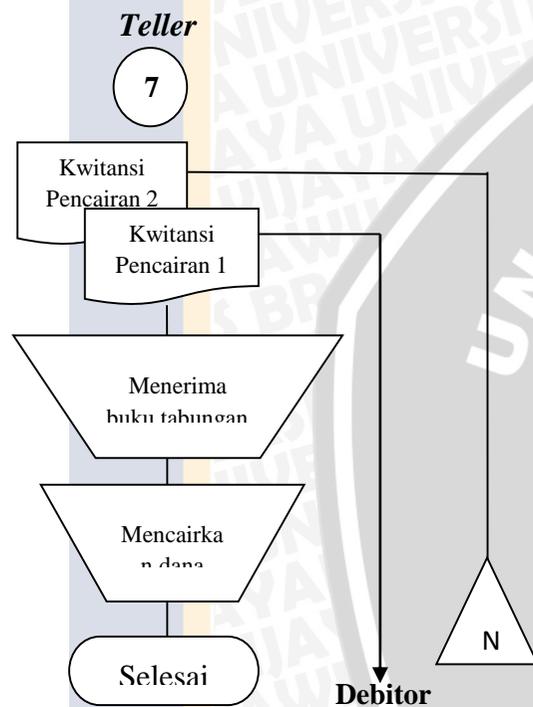
- 3) Apabila proses realisasi pengesahan pinjaman kredit selesai, nasabah dengan membawa buku tabungan beserta bukti kwitansi pencairan akan diarahkan menuju *teller* untuk melakukan pencairan dana.

Apabila prosedur dalam pemberian kredit modal kerja Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates disajikan dalam bentuk *flowchart* pada gambar 2 akan tampak sebagai berikut (halaman 82)









Gambar 2. Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates

Keterangan :

- SKPP : Surat Keterangan Permohonan Pinjaman
- SPH : Surat Pengakuan Hutang
- SPPK : Surat Persetujuan Perjanjian Kredit
- CRS : *Call Report Survey* / Laporan Kunjungan Nasaba

5. Contoh Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT Bank Pembangunan

Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates

- a. Nama Pemohon : Ahmad Sonif
- b. Alamat : Dsn Cendono RT011 RW004 Desa
Cendono Kec Kandat Kediri Jawa Timur
- c. Plafond : Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)
- d. Jenis Kredit : Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- e. Jangka Waktu : 36 bulan sejak ditandatangani akad kredit
- f. Bunga : 13% per annum efektif floating rate
- g. Tujuan Penggunaan : Tambahan modal kerja untuk peternakan
- h. Sektor Usaha : Perdagangan sapi
- i. Golongan Debitur : Perseorangan
- j. Jenis Jaminan : Jaminan pokok berupa usaha peternakan
- k. Jenis Jaminan Tambahan : Sebidang tanah pekarangan seluas 1585
Meter persegi yang terletak di Desa
Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten
Kediri, pemegang hak Ahmad Sonif dengan
Nilai pengikatan jaminan Rp
265.600.000,00
- l. Angsuran : Angsuran dibayar tiap bulan angsuran
Pokok dan bunga dibayar saat jatuh tempo
- m. Biaya Biaya : Realisasi kredit yang harus dipenuhi
- Provisi 0,5% : Rp 1.000.000,00

- Administrasi	: Rp 250.000,00
- Taksasi	: <u>Rp 500.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.750.000,00

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates telah memberikan Kredit modal kerjanya sebesar Rp 200.000.000,00, dengan jangka waktu tiga tahun. Dalam pemberian kreditnya telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank.

6. Pengawasan Pemberian Kredit Modal Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates

Pengawasan Kredit merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dilakukan dalam rangka memperkecil risiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit. Terdapat dua jenis pengawasan kredit yang ditetapkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates sebagai berikut:

a. *Preventif Control*

Pengawasan ini dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates sebelum kredit dicairkan atau disalurkan kepada calon debitur yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dikemudian hari. Pengawasan ini dapat dilihat mulai dari :

1) Pengawasan Fisik atau Inspeksi *On The Spot*

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung atau kunjungan langsung di tempat calon debitur. Pelaksanaan kunjungan mempunyai arti yang sangat penting karena dapat membantu bank dalam mengambil langkah-langkah *preventif* yang dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Wates sebelum kredit tersebut dicairkan atau diberikan kepada calon debitur. Kunjungan ini wajib dilakukan oleh bagian kredit karena untuk mengetahui kebenaran dari seluruh keterangan atau data nasabah.

2) Pembinaan terhadap debitur

Pelaksanaan pengawasan kredit harus disertai dengan pembinaan terhadap debitur, tanpa adanya pembinaan maka pengawasan kredit yang dilakukan tidak ada artinya apalagi untuk usaha kredit kecil atau menengah. Pihak bank selain melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit tetapi juga membantu memberikan masukan guna meningkatkan usaha dari debitur maupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh debitur. Pembinaan ini biasa dilakukan pada saat kunjungan awal oleh pihak bank. Pembinaan kepada debitur meliputi :

- (1) Pengamatan mengenai kesesuaian tujuan awal pemberian kredit dengan penggunaan kredit oleh nasabah. Apabila terjadi penyimpangan akan dapat dilihat sejauh mana penyimpangan

tersebut dapat ditoleransi dengan memperhatikan resiko yang mungkin timbul.

- (2) Mengadakan pengamatan mengenai pengelolaan usaha.
- (3) Memberikan saran-saran yang diperlukan menyangkut masalah yang dihadapi.
- (4) Melakukan pendekatan secara personal dengan debitor untuk membina hubungan yang baik untuk menghindari kredit bermasalah.

3) Administrasi perkreditan

Pengawasan ini merupakan salah satu obyek pengawasan kredit untuk mengumpulkan atau menyusun dan memeriksa data-data maupun berkas-berkas kelengkapan debitor yang dibutuhkan selama proses kegiatan kredit berlangsung. Tujuan dari administrasi perkreditan ini untuk mendukung langkah-langkah penilaian perkembangan kredit atau usaha debitor dan pengawasan kredit sehingga kepentingan pihak bank dapat terpenuhi. Dengan adanya pelaksanaan administrasi perkreditan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber bahan perbaikan dalam kebijakan perkreditan dan juga sebagai bahan persiapan pembuatan laporan yang diperlukan.

b. Represif Control

Merupakan pengawasan selanjutnya setelah *preventif control* pengawasan yang dilakukan pada saat kredit tersebut diberikan atau disalurkan kepada debitor seperti pemantauan atau kunjungan ke tempat debitor karena hal

tersebut sangat penting bagi pihak bank untuk mengetahui perkembangan usaha debitur dan pengawasan ini hanya dilakukan sekali setelah pencairan kredit dan akan dilakukan kunjungan kembali pada saat debitur mulai terlihat adanya gejala terjadinya kredit bermasalah. Selain itu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Wates juga melakukan pengawasan yang disebut *Monitoring* yaitu pengawasan yang digunakan sebagai upaya peringatan yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas kredit serta untuk menentukan tingkat kualitas atau kolektibilitas kredit yang bersangkutan, dan pengawasan ini bertujuan agar debitur disiplin dalam membayar atau melunasi setiap pinjaman dengan tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati antara debitur dengan pihak bank.

7. Kolektibilitas Kredit

Berikut ini disajikan data Kredit Modal Kerja yang disalurkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates pada periode 2013 sampai dengan 2015, kredit yang disalurkan ini telah dikelompokkan berdasarkan kolektibilitas yang telah ditetapkan Bank yaitu Lancar (Kolektibilitas1), dalam perhatian khusus (Kolektibilitas2), kurang lancar (Kolektibilitas3), diragukan (Kolektibilitas4) dan macet (Kolektibilitas5). Kredit Bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates adalah kredit yang tergolong kolektibilitas 3, 4 dan 5 yaitu kurang lancar, diragukan dan macet.

Tabel 2 Data Kolektibilitas Kredit Modal Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Capem Wates Periode 31 Desember 2013 - 31 Desember 2015 (dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Lancar	54.044.954.431,41	74.102.904.437,63	79.799.837.065,48
DPK	350.828.888,38	413.993.487,55	285.820.156,14
Kurang Lancar	-	-	367.692.894,06
Diragukan	-	24.169.654,53	-
Macet	486.145.273,12	232.839.983,85	440.994.023,10
TOTAL	54.881.928.592,91	74.773.907.563,53	80.894.344.138,78

Sumber: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri

Tabel 3 Data Kredit Bermasalah pada Kredit Modal Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Capem Wates Periode 31 Desember 2013 - 31 Desember 2015

Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Kurang Lancar	-	-	367.692.894,06
Diragukan	-	24.169.654,53	-
Macet	486.145.273,12	232.839.983,85	440.994.023,10
TOTAL	486.145.273,12	257.009.638,38	808.686.917,16

Sumber: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates

Pelaksanaan prosedur pemberian Kredit Modal Kerja pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates terdapat perbedaan dengan ketentuan dari bank dan juga teori yang dikemukakan oleh kasmir yaitu perbedaan terletak pada kunjungan atau wawancara ke tempat debitor dalam ketentuan bank dan teori kasmir wawancara dilakukan dua kali, wawancara pertama merupakan penyelidikan kepada calon debitor untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas yang diajukan sesuai dan wawancara kedua merupakan perbaikan berkas apabila ada kekurangan setelah dilakukan *on the spot* dan apabila masih terdapat kurangnya informasi pihak bank dapat menghubungi via *telephone*. Namun dalam praktiknya yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates sebagai berikut :

a. Pengajuan Permohonan Kredit

Proses awal pengajuan kredit berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan bank sudah sesuai dengan pelaksanaan atau praktiknya yaitu hanya menggunakan formulir berupa Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) disertai perlengkapan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan dalam pengajuan kredit. Apabila berkas-berkas persyaratan yang diterima sudah lengkap sesuai dengan yang ditentukan maka akan didisposisikan kebagian umum untuk diserahkan ke penyelia operasional kredit. Tetapi apabila berkas persyaratan dari calon debitor belum sesuai atau tidak

lengkap, maka berkas akan dikembalikan kepada calon debitur. Namun dalam teori Kasmir yang digunakan sebagai acuan menyatakan bahwa pada tahap pengajuan permohonan kredit calon debitur membuat proposal yang terkait dengan latar belakang perusahaan sampai dengan keterangan tentang berapa jumlah pinjaman. Prosedur permohonan kredit berjalan cukup baik, tetapi alangkah baiknya apabila berkas sebelum didisposisikan kebagian umum yang nantinya akan diturunkan ke penyelia kredit, ada kalanya seluruh berkas persyaratan kredit diserahkan kebagian analis kredit untuk dilakukan pemeriksaan kembali terkait kelengkapan berkas. Sehingga berkas yang nantinya akan didisposisikan ke penyelia operasional kredit sudah lengkap untuk dijadikan keputusan apakah data debitur dinyatakan layak atau tidak.

e. Analisis Kredit

Tahapan analisis kredit Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates melakukan wawancara kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan dan biasanya wawancara juga dilakukan sekali apabila terdapat kurangnya informasi pihak bank menghubungi melalui *telephone*. Bagian analis kredit Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates ini menerima dan melakukan pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan persyaratan kredit serta melakukan BI *Checking* laporan yang dikeluarkan Bank Indonesia yang berisi riwayat kredit/pinjaman nasabah kepada bank lain dalam data Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia, kemudian melakukan

kunjungan ke tempat usaha debitor (*On The Spot*) serta menilai jaminan nasabah. Setelah melakukan kunjungan langsung bagian analis kredit membuat laporan kunjungan nasabah pada lembar *Call Report Survey* sesuai dengan keadaan nasabah atau calon debitor yang sebenarnya. Penilaian evaluasi kelayakan debitor dilakukan dengan berdasarkan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Penerapan pemberian kredit yang dilakukan oleh bagian analisis kredit sudah berjalan dengan baik, namun akan lebih baiknya apabila penilaian agunan dilakukan oleh seorang supervision yang berkaitan dengan masalah kredit apakah kredit tersebut kedepannya dapat menguntungkan atau tidak.

f. Putusan Kredit

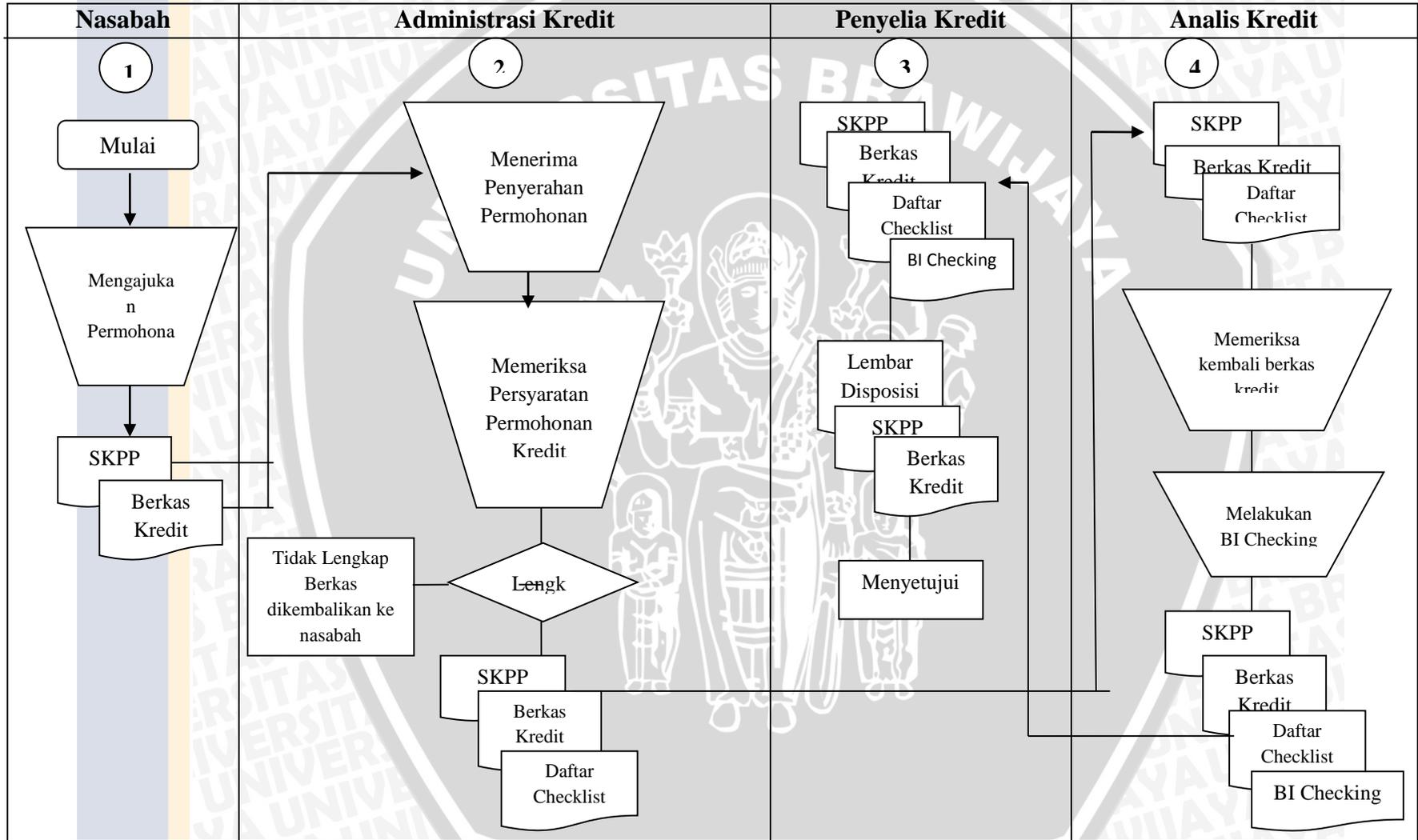
Tahapan putusan kredit pada saat pimpinan cabang pembantu setuju dengan hasil rekomendasi, dan pimpinan cabang akan membuat catatan kepada bagian administrasi kredit atas pembuatan formulir yang berupa putusan kredit (PTK) untuk putusan kredit yang diterima, sedangkan apabila permohonan kredit ditolak maka seluruh berkas akan dikembalikan ke penyelia kredit untuk tanda tangan persetujuan kredit dan kemudian diserahkan kebagian analis kredit. Analisis kredit yang nantinya akan menyerahkan kepada bagian administrasi kredit untuk membuat surat penolakan dengan disertai alasan penolakan. Hal tersebut telah dilaksanakan dengan prosedur yang sesuai dengan penanggung jawab yang baik. Namun, untuk lebih efisien lebih baik apabila permohonan

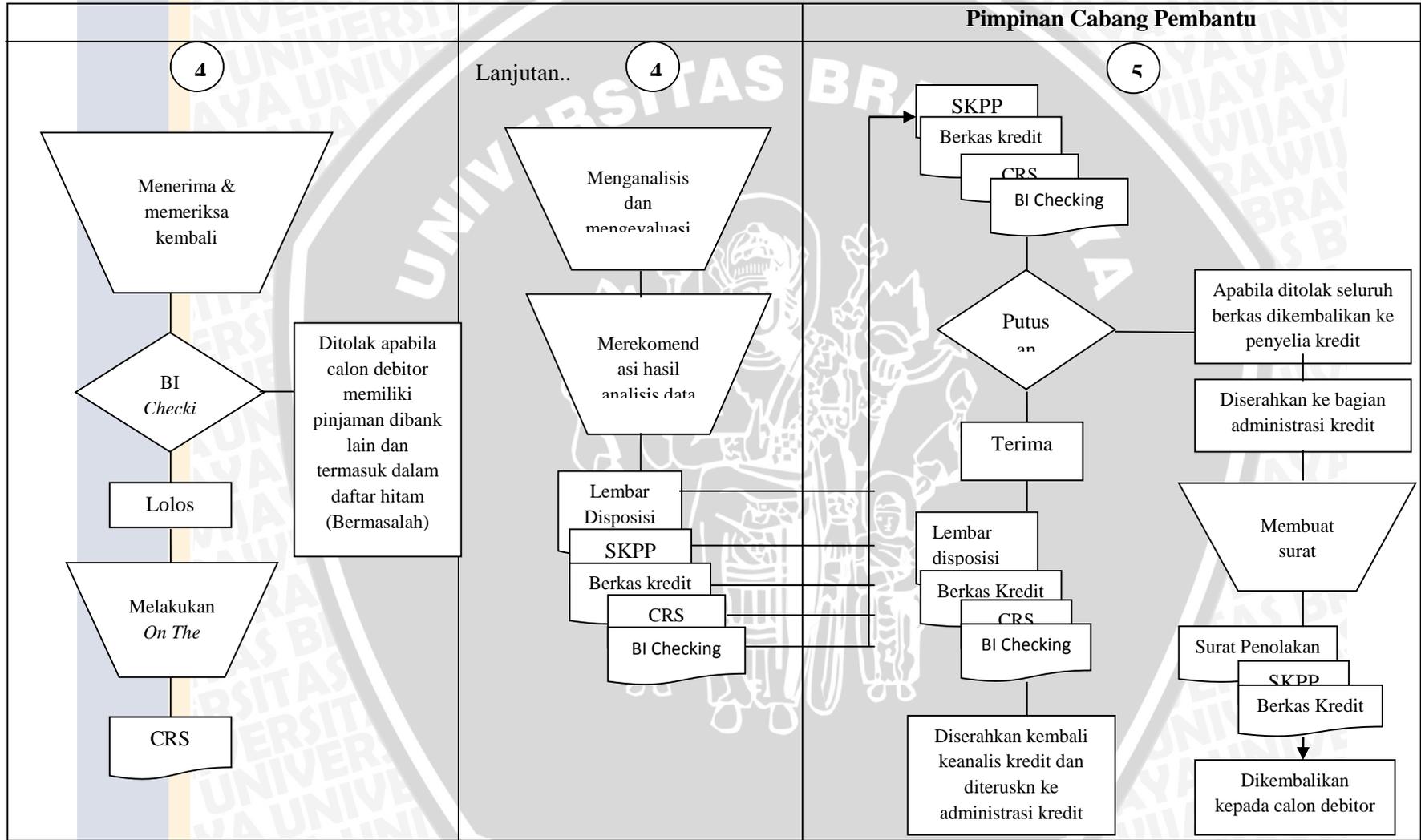
kredit yang diajukan tersebut dinyatakan ditolak oleh pimpinan cabang pembantu maka setelah semua berkas dikembalikan kepada penyelia kredit yang berwenang atas penyaluran kredit langsung menyerahkan seluruh berkas kepada bagian administrasi kredit tanpa harus diserahkan terlebih dahulu ke bagian analisis kredit.

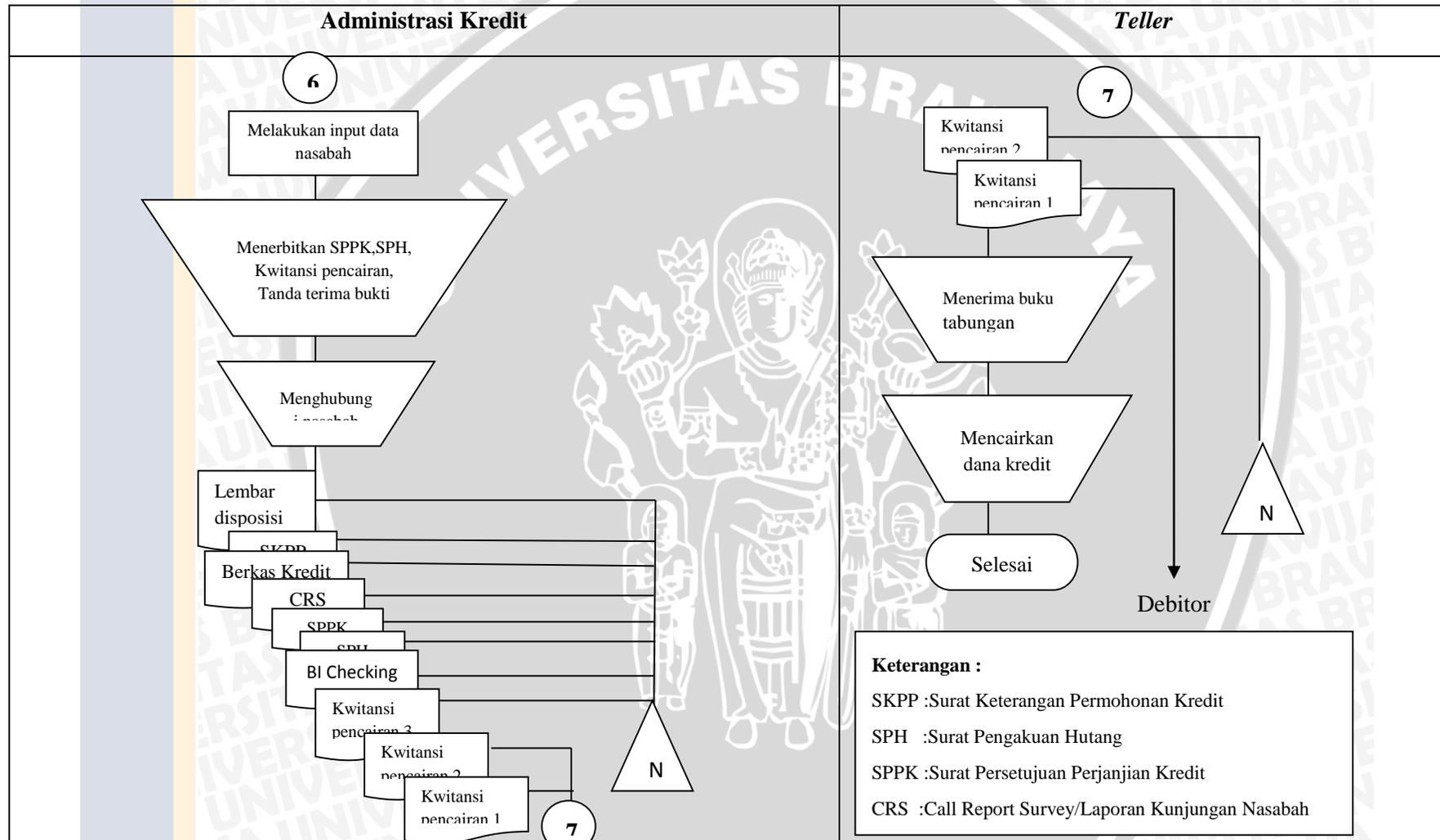
g. Penyaluran Kredit

Bagian analis kredit melakukan aplikasi untuk data persetujuan kredit (menginput data) nasabah yang disetujui pinjaman kreditnya oleh pihak bank, kemudian menerbitkan surat persetujuan pemberian kredit (SPPK), surat advis, surat pengakuan hutang (SPH), Surat perjanjian kredit, kwitansi pencairan dan tanda terima bukti agunan. Bagian analis kredit menghubungi nasabah untuk melakukan realisasi kredit dengan memberitahukan bahwa debitor diharuskan untuk membawa buku tabungan bank jatim. Realisasi dilakukan antara nasabah dan notaris, maka nasabah akan diarahkan ke *teller* untuk melakukan pencairan dana. Realisasi kredit yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditentukan.

Prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates (yang disarankan) diatas dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan alur atau *flowchart* sebagai berikut :







Gambar 3: Prosedur Pemberian Kredit yang disarankan (data diolah)

2. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates

Pengawasan kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates yang menjadi obyek penelitian ini merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank kepada debitur yang dilakukan pada saat proses permohonan kredit atau pra realisasi sampai dengan pasca realisasi kredit atau sampai debitur melunasi kreditnya. Fungsi pengawasan dalam bidang perkreditan sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya risiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates telah sesuai dengan pedoman ketetapan bank dan juga teori dikemukakan oleh (Irham, 2014) yaitu terdiri dari dua jenis pengawasan, *Preventif Control* dan *Represif Control*. *Preventif Control* yang dilakukan sebelum kredit disalurkan kepada calon debitur seperti pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan berkas hingga survei langsung ke lapangan, namun pada pengawasan *Represif Control* terdapat sedikit perbedaan antara ketetapan bank, teori dan juga pelaksanaan praktik yang dilakukan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk cabang Pembantu Wates.

Perbedaan pada pengawasan *represif control* berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank yang dijadikan sumber data terletak pada kunjungan dilakukan petugas bank ke lokasi debitur (*On The Spot*). Pada teori kunjungan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan, sedangkan

ketetapan bank kunjungan dilakukan, minimal sekali dalam dua bulan. Namun dalam praktiknya kunjungan yang dilakukan belum maksimal sesuai dengan ketetapan melainkan dilakukan 1-2 kali setelah pencairan kredit dan bisa juga dilakukan secara mendadak, dan akan dilakukan kunjungan lagi jika debitor terlihat mulai mengalami tanda-tanda akan terjadinya kredit bermasalah. Seharusnya apabila bank melakukan kunjungan lebih dari satu atau dua kali akan lebih baik untuk mengetahui perkembangan usaha debitor sehingga dapat meminimalkan terjadinya kredit bermasalah.

3. Analisis Non Performing Loan (NPL)

Data mengenai Kredit Modal Kerja yang disalurkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates pada tabel 2 menunjukkan bahwa total kredit yang disalurkan setiap tahunnya semakin meningkat. Kredit modal kerja yang disalurkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Wates pada tahun 2013 sebesar Rp 54.881.928.592,91, kemudian pada tahun 2014 kredit yang disalurkan sebesar Rp 74.773.907.563,56 (Terjadi peningkatan sebesar Rp 19.891.978.970,65), dan pada tahun 2015 penyaluran kredit meningkat (Rp 6.120.436.575,22) menjadi Rp 80.894.344.138,78. Meskipun sebagian besar kredit modal kerja yang disalurkan termasuk dalam kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, namun kolektibilitas tersebut jumlahnya dapat menurun apabila tidak dilakukan pengawasan secara terus menerus.

Tabel 3 Telah menunjukkan bahwa total kredit bermasalah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates

mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kredit bermasalah pada tahun 2013 sebesar Rp 486.145.273,12 kemudian untuk tahun 2014 kredit bermasalah mengalami penurunan sebesar Rp 229.135.634,74 menjadi Rp 257.009.638,38,- kemudian pada tahun 2015 kredit bermasalah mengalami peningkatan lagi sebesar Rp 808.686.917,16 (terjadi peningkatan sebesar Rp 551.667.278,78). Pada tahun 2013 dan 2014 tidak ada debitor yang termasuk dalam kolektibilitas kredit kurang lancar, tetapi pada tahun 2015 terdapat kredit bermasalah dalam kolektibilitas kredit kurang lancar sebesar Rp 367.692.894,06 dan pada tahun 2013 dan 2015 untuk kolektibilitas kredit diragukan juga tidak ada sedangkan untuk kredit bermasalah yang tergolong dalam kolektibilitas diragukan pada tahun 2014 sebesar Rp 24.169.654,53. Kredit bermasalah yang tergolong dalam kolektibilitas macet selalu lebih banyak dibandingkan kredit kurang lancar dan diragukan.

Berdasarkan tabel 2 dan 3 dapat diketahui besarnya prosentase kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)* Kredit Modal Kerja pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Wates periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

$$\text{NPL} : \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{a. NPL tahun 2013} &= \frac{486.145.273,12}{54.881.928.592,91} \times 100 \\ &= 0,89\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. NPL tahun 2014} &= \frac{257.009.638,38}{74.773.907.563,56} \times 100 \\ &= 0,34\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. NPL tahun 2015} &= \frac{808.686.917,16}{80.894.344.138,78} \times 100 \\ &= 0,99\% \end{aligned}$$

Dilihat dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data yang telah disajikan yaitu kredit yang disalurkan dan kredit yang bermasalah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates pada periode 2013 sampai dengan 2015, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan total kredit modal kerja yang disalurkan tetapi tidak diikuti pula oleh kredit bermasalah pada tahun 2014 kredit bermasalah sempat mengalami penurunan tetapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan kembali. Batas maksimal NPL yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%, namun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates memiliki target NPL dari kantor pusat dimana setiap kantor cabang memiliki target yang berbeda-beda untuk setiap tahunnya. Untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Wates telah ditetapkan target NPL sebesar 0,65% jadi untuk kredit bermasalah masih dalam batasan yang wajar. Apabila prosentase kredit bermasalah suatu bank lebih besar dibandingkan NPL yang ditetapkan Bank Indonesia, maka hal tersebut akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran kredit dan dapat mengurangi penilaian dapat mengurangi penilaian terhadap tingkat kesehatan bank tersebut. Karena secara umum besarnya NPL Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates masih dibawah target

yang ditentukan dan masih dalam batas kewajaran maka dapat dikatakan baik. Namun demikian, masih perlu melakukan berbagai upaya lagi untuk meminimalkan NPL sekecil mungkin, karena semakin rendah NPL maka akan semakin baik tingkat penilaian kesehatan.

Besarnya NPL pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates selalu berfluktuasi. Terjadinya kenaikan besarnya kredit bermasalah atau NPL ini disebabkan oleh beberapa Faktor, yaitu:

a. Faktor Intern

Faktor intern yang dapat menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit yaitu dalam hal analisis, administrasi maupun pengawasan fisik dan agunan. Pihak bank perlu meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan kredit dan pengendalian intern yang salah satunya lebih memperketat pengawasan kredit yang ada.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang berhubungan dengan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit, hal ini sering terjadi karena kegagalan bisnis atau menurunnya usaha debitor dan penyalahgunaan dana kredit. Pemakaian kredit yang menyimpang akan mengakibatkan nasabah tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya dan dengan menurunnya usaha debitor tentunya akan menurunkan pendapatan perusahaan dalam melunasi angsuran pinjaman kepada bank. Terdapat juga unsur

ketidaksengajaan yang dilakukan nasabah seperti bencana alam. Bencana alam dapat mengganggu produktivitas usaha debitur sehingga berakibat pada memburuknya keuangan debitur

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut, maka salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates adalah pelaksanaan fungsi pengawasan kredit. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates perlu meningkatkan intensitas pengawasan kredit agar dapat segera teridentifikasi apabila terjadi penyimpangan oleh debitur atau sudah mulai terlihat adanya gejala akan terjadinya kredit bermasalah. Selain itu juga perlu dilakukan tindakan yang lebih tegas kepada debitur yang telah melakukan penyimpangan, seperti berupa peringatan atau teguran dan penagihan.

Seperti yang telah dijelaskan pada analisis pengawasan kredit, maka pelaksanaan pengawasan kredit dinilai cukup efektif sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir kredit bermasalah. Dengan upaya-upaya yang dilakukan tersebut diharapkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates dapat menurunkan rasio *Non Performing Loan* (NPL) menjadi lebih kecil dan mendekati 0%.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan pemberian kredit modal kerja yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates menggunakan pengawasan secara *Preventif Control* dan *Represif Control* sesuai dengan ketentuan bank dan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu yang dikemukakan oleh kasmir, Namun dalam pelaksanaan kunjungan ke tempat debitur tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan bank dan juga teori. Pengawasan kunjungan ke tempat debitur hanya dilakukan sekali setelah pencairan kredit dan pada saat debitur mengalami masalah.
2. Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates yang disebut dengan kredit bermasalah dan termasuk dalam perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) yaitu kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio NPL untuk tahun 2013 0,89%, tahun 2014 0,34% dan untuk tahun 2015 0,99%. Kredit bermasalah yang terjadi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Wates melebihi target dari kantor pusat namun untuk target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia masih dalam batas kewajaran karena masih jauh dari dibatas yaitu 5%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran untuk dapat dipergunakan sebagai beban pertimbangan.

1. Pelaksanaan pengawasan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates dengan menggunakan Pengawasan secara *Preventif Control* dan *Represif Control* sudah cukup baik, Namun masih ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi yaitu pengawasan ke tempat debitor sebaiknya dilakukan secara rutin misalnya satu bulan sekali agar pihak bank dapat mengetahui perkembangan usaha debitor, dan apabila debitor terlihat mengalami masalah pihak bank dapat segera membantu memberikan jalan keluarnya agar debitor tidak mengalami permasalahan yang lebih besar yang dapat mengakibatkan bertambahnya kredit bermasalah.
2. Berdasarkan kesimpulan mengenai Kredit Bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates meski masih dalam batas kewajaran alangkah baiknya pihak bank lebih meningkatkan lagi dalam memberikan pengawasan sehingga dapat meminimalkan prosentase *Non Performing Loan* (NPL) hingga mendekati atau mencapai 0% karena semakin kecil prosentase NPL, maka semakin baik tingkat penilaian kesehatan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin & Tantri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah, Faisal. 2005. *Manajemen Perbankan, Cetakan Ketiga, UUM Press*, Malang.
- Arthesa, Ade, dan Edia Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta : PT. Indeks.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra dan Suhardjono. 2006. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Budisantoso, Totok dan Nuritomo. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Firdaus, Rachmat & Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Cetakan Kelima*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ismail. 2010. *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Irham, Fahmi. 2014. *Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.
- Kasmir. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muljono, Teguh Pudjo. 2001. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE
- PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (Persero) Tbk.

Rivai, Veithzal. 2013. *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

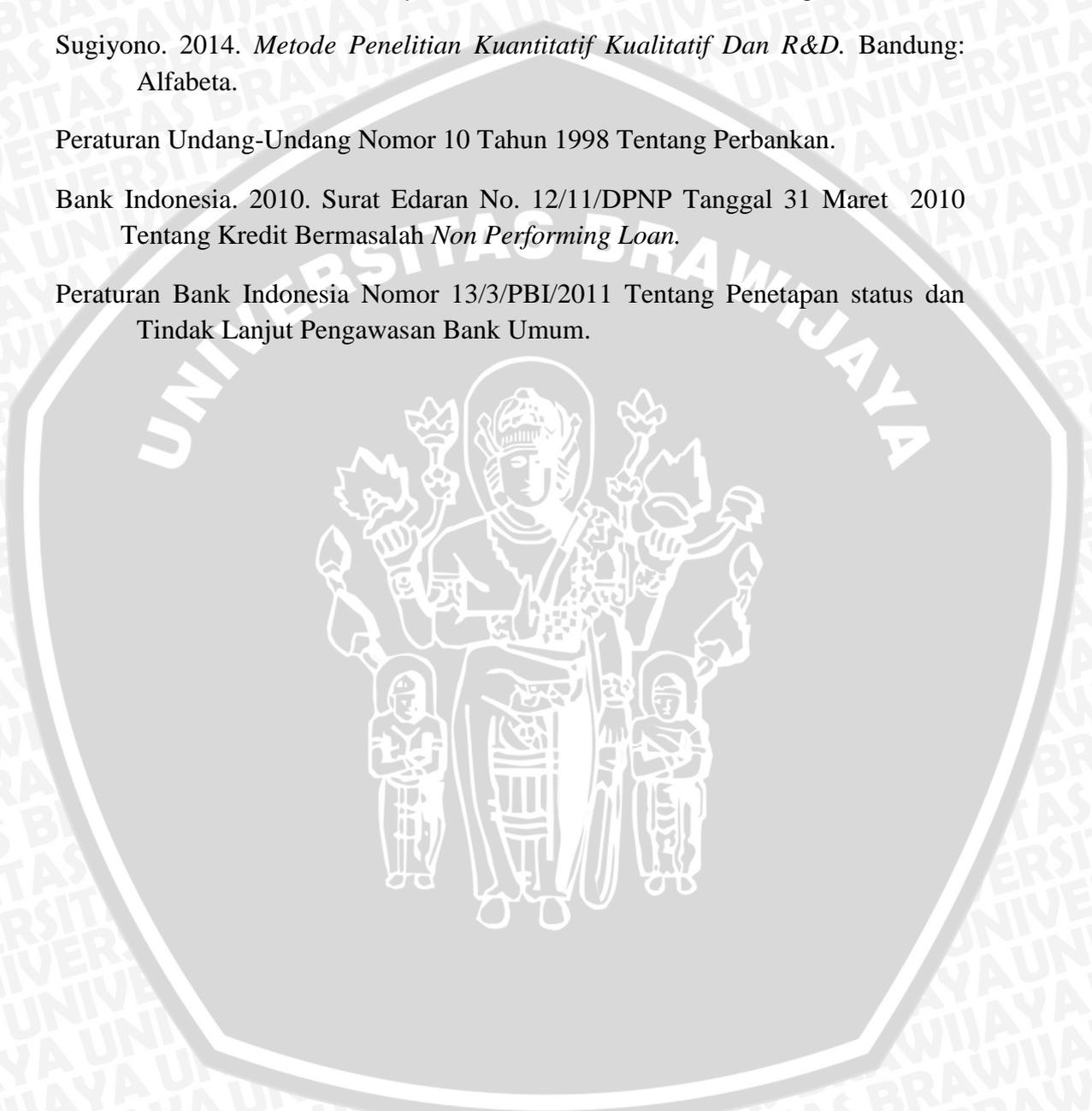
Sunarti. 2011. *Sistem dan Manajemen Perbankan Indonesia*. Malang: NN Press.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Bank Indonesia. 2010. Surat Edaran No. 12/11/DPNP Tanggal 31 Maret 2010 Tentang Kredit Bermasalah *Non Performing Loan*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.



Kepada :
Yth. Pemimpin Bank Jatim
Cabang Pembantu Wates
Jl. Raya Tawang NO 150 Wates
KEDIRI

Perihal : Permohonan Kredit

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat Rumah :
Alamat Usaha :
Jenis Usaha :
Telp yang dapat dihubungi :

Dengan ini kami mengajukan permohonan kredit kepada Bank Jatim
Cabang Pembantu Wates :

Sebesar :
Jangka Waktu :
Tujuan penggunaan dana untuk :

Untuk kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP Suami dan Istri
2. Fotocopy KSK (Kartu Susunan Keluarga)
3. Fotocopy Surat Nikah
4. Pas foto 4x6 suami istri
5. Fotocopy Sertifikat yang akan dijaminkan
6. Fotocopy KTP suami istri pemilik jaminan
7. Fotocopy surat nikah pemilik jaminan
8. Fotocopy PBB
9. Surat Keterangan harga tanah dari desa
10. Surat Keterangan usaha dari desa
11. Legalitas usaha (NPWP, SIUP, TDP)
12. Laporan SPT Tahunan
13. Denah Lokasi

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Foto
4x6

Kediri,
Pemohon,

()

SURAT AKSEP

Pada tanggal,

Yang bertanda tangan dibawah ini : /Atas Pengunjukan surat askep ini,

Nama Lengkap Debitur :

Beralamat di :

Nama Lengkap Istri Debitur :

Beralamat di :

Dalam kedudukan sebagai

Pemimjam/Penangung jawab.
Pemilik Jaminan

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab secara tanggung renteng

Berdasarkan Surat Persetujuan Perjanjian Kredit No : /PUN/ /2016
Tanggal, sanggup membayar di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri.

Jumlah uang sebesar..... **(Nominal Tertulis)**

Kediri,.....

Materai 6000

Debitur)

(Debitur)

(Istri



ADPIS PERKREDITAN

051/ /CWT/PMS/KUR

Telah direalisasikan :
 Akte Perjanjian :
 Atas Nama :
 N.P.W.P :
 Alamat :
 Plafond :
 Jangka Waktu :
 Bunga :
 Pola Pengembalian :

Jenis penggunaan :
 Sektor usaha :
 Golongan debitur :
 Jenis Jaminan utama :
 Jenis jaminan Tambahan :

Nilai THLS Jaminan :
 Biaya-biaya:
 Materai :
 -Provisi :
 -Administrasi :
 -Taksasi :
 Jumlah :



Kediri, / /

BANK JATIM
 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk
CABANG KEDIRI



CURRICULUM VITAE

Nama : Arum Novianita Witanti
Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk/18 November 1993
Alamat : Dusun Tampang, Desa Wilangan RT1/RW2
Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk
Email : Novianita.arum@yahoo.com
Telephone : 085736723588
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam



Riwayat Pendidikan Formal

1. Tahun 1999-2000 : TK Pertiwi Wilangan
2. Tahun 2000-2006 : SDN Wilangan III
3. Tahun 2006-2009 : SMP Negeri 1 Nganjuk
4. Tahun 2009-2012 : SMA Negeri 2 Nganjuk
5. Tahun 2012-2016 : Universitas Brawijaya Malang